

JURNAL
AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 2, Nomor 1, Mei 2009

JAK

Diterbitkan oleh
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
bekerjasama dengan
Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPPI) Komisariat Sumatera Barat

JAK	Volume 2	Nomor 1	Hal. 1-60	Padang Mei 2009	ISSN 1979-9470
------------	-----------------	----------------	------------------	----------------------------	---------------------------

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 2, Nomor 1, Mei 2009

Jurnal Agribisnis Kerakyatan adalah wadah informasi bidang agribisnis kerakyatan berupa hasil penelitian, studi kepustakaan dan tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2008 dengan frekuensi tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November

Ketua Penyunting

Dr. Ir. Endry Martius, MSc

Wakil Ketua Penyunting

Dr. Ir. H. Nofialdi, MSi

Sekretaris

Yusmarni, SP, MSc

Penyunting Pelaksana

Dr. Ir. Faidil Tanjung, MSi

Ir. Herry Bachrizal Tanjung, MSi

Dr. Ir. Ira Wahyuni Syafri, MSi

Ir. M. Refdinal, MS

Syofyan Fairuzi, STP, MSi

Vonny Indah Mutiara, SP, MEM

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MSc (Universitas Lampung)

Dr. Ir. Djaswir Zein (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Helmi (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Maman Haeruman Karmana, MSc (Universitas Padjajaran)

Prof, Dr, Ir, Muchlis Muchtar, MS (Universitas Andalas)

Dr, Ir, Muktasam Abdurrahman, MSc (Universitas Mataram)

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MSi (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, MSc (Universitas Andalas)

Dr, Agr, Sri Peni Wastutiningsih (Universitas Gadjah Mada)

Dr, Ir, Suardi Tarumun, MSc (Universitas Riau)

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Sutriyono, MS (Universitas Jember)

Alamat Redaksi

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Kampus Unand Limau Manis, PADANG, 25163 Telp (0751) 72774

Email : jakfpua@faperta.unand.ac.id

Jurnal Agribisnis Kerakyatan diterbitkan oleh

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

bekerjasama dengan

Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPPI) Komisariat Sumatera Barat

ISSN 1979-9470

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 2, Nomor 1, Mei 2009

DAFTAR ISI

Assalamu'alaikum:

Mulai Meretas Jalan :Dari Efisiensi Ke Dekomodifikasi

Endry Martius

Masalah Pasar Lelang Produk Pertanian Sumatera Barat

Endry Martius

1-10

Analisa usahatani tanaman pisang (*musa parasidiaca* L) dengan menggunakan bibit kultur jaringan (*in vitro*) yang diberi Fungi Mikoriza Arbuscula (FMA) pada kelompok tani mitra tani di kanagarian tabek panjang kecamatan baso kabupaten agam

11-24

Zelfi Zakir

Perspektif budaya dan institusi

25-34

Pengembangan kawasan peternakan rakyat

Fuad Madarisa

Perspektif penyuluhan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani

35 - 48

Hery Bachrizal Tanjung

Strategi penyiapan pengusaha industri makanan ringan perempuan minangkabau

49-60

Nofialdi, Hasnah dan Rina Sari

ASSALAMU'ALAIKUM

MULAI MERETAS JALAN:DARI EFISIENSI KE DEKOMODIFIKASI

Pendapatan pelaku pertanian yang diturunkan dari peningkatan efisiensi pertanian, di hulu ataupun di hilir, masih berpeluang untuk ditingkatkan. Itulah agaknya yang tergambar jelas dari sejumlah tulisan pada volume JAK kali ini. Misalnya, Zelfi Zakir menandai perbaikan dalam teknik budidaya pada usahatani pisang bisa meningkatkan pendapatan usahatani secara signifikan. Novialdi, Hasnah dan Rina Sari, yang meneliti di ranah industri makanan oleh pelaku usaha perempuan Minangkabau, juga memperoleh bukti bahwa efisiensi masih bisa terjadi dan sekaligus berkontribusi pada pendapatan rumahtangga. Walau tidak eksplisit, hasil penelitian mereka sebenarnya telah menghargai pentingnya kedudukan pelaku usaha perempuan terhadap kelangsungan industri makanan tersebut.

Selain soal efisiensi teknis dan manajemen usaha, kekuatan diri atau kesejahteraan petani tetap selalu perlu diperhatikan. Begitulah kira-kira muatan penting tulisan Fuad Madarisa (FM) dan Hery Bachrizal Tanjung (HBT). Namun begitu, menurut HBT, kesejahteraan petani itu telah digerus oleh intervensi pemerintah yang memusatkan perhatiannya pada peningkatan produksi. Spirit dan kesejahteraan petani terabaikan, sementara penyuluhan pertanian malah memfasilitasi ketidak berdayaan petani. Semua jadi tergantung pada pemerintah. Dengan kalimat yang berbeda, FM menyatakan fenomena tersebut sebagai gangguan pada fondasi kultural dan kelembagaan pembangunan pertanian—sebagaimana secara khusus terlihat pada subsektor peternakan rakyat.

Sehubungan dengan itu, upaya peningkatan pendapatan petani tampaknya akan tetap berat. Walau tantangan teknis di tingkat *on-farm* sudah semakin bisa diatasi, dalam pengertian bahwa usahatani sudah semakin efisien, masalah-masalah hilir di ranah pemasaran produk pertanian masih tetap tidak terpecahkan. Sebagaimana ditemukan Endry Martius, skenario pasar lelang yang seharusnya dapat menjadi jawaban terhadap masalah ternyata tetap belum merupakan sistem pemasaran yang ramah bagi petani produsen, apalagi menjadi amat relevan dengan keperluan untuk menyejahterakan petani. Dalam konteks petani Indonesia yang umumnya masih tergorong miskin, cara-cara fundamental di luar mekanisme pasar agaknya harus dilakukan, yaitu melalui '*income-transfer*'. Setiap petani berhak mendapat 'kompensasi-tanpa-referensi' dari negara atas kontribusinya dalam menciptakan kesejahteraan nasional. Cara demikian boleh disebut dekomodifikasi—yang berarti bahwa ketergantungan petani dalam mendapatkan kesejahteraan melalui pasar komoditas pertanian dihapuskan dan lalu digantikan dengan perangkat kebijakan sosial yang berbasis

pada prinsip kesejahteraan sebagai hak setiap warga (*right of citizenship*) dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya (*state obligation*). Tema yang terakhir ini bisa ditindak-lanjuti pada edisi-edisi mendatang sebagai bagian penting untuk memantapkan pemahaman tentang ekonomi pertanian dan agribisnis kerakyatan.

Endry Martius

MASALAH PASAR LELANG PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT

Endry Martius

Abstract: *The paper notices that the agricultural product's forward-marketing of West Sumatra are not devoted to help small-farmers. In fact, the problems might not be only of functionally in its technical implementation, but also fundamentally embedded on its concept which had not certainly and specifically addressed small-farmers to take a part. These situations imply that it is required to have a scenario to protect small-farmers from such an unfriendly market by spending compensations or subsidies generated from state or government budget.*

Kata kunci: pasar lelang, plkp, produk pertanian, petani, Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktek pasar lelang produk atau komoditas pertanian (plkp)¹ sudah dikenal sejak dua dekade yang lampau. Departemen Perdagangan RI mulai melakukan pengembangan dan pembinaannya sejak 1993 sejalan dengan saat ketika Badan Pelaksana Bursa Komoditas melakukan kajian kelayakan pasar lelang bersama dengan Lembaga Penelitian IPB di Sumatera Utara. Hasil kajiannya menyatakan bahwa pasarlelang komoditas hortikultura dan sayur-sayuran mempunyai keunggulan komparatif bagi daerah yang bersangkutan. Mulai tahun 2000-an plkp mulai pula tumbuh di pulau Jawa, yaitu di Bandung mulai Desember 2002, di Semarang Nopember 2003, Surabaya Januari 2004, Purwokerto dan Kabupaten Agam Suma-

tera Barat Februari 2004, dan Manado April 2004.

Keberadaan plkp di Sumatera Barat dianggap penting sebagai jawaban atas kondisi sistem pemasaran komoditas pertaniannya yang masih rumit, sulit dikendalikan dan biasanya tidak kondusif bagi produsen terutama petani gurem.² Plkp diasumsikan akan menyelesaikan soal tersebut karena: (i) menyederhanakan alur pemasaran komoditas pertanian; (ii) memperbaiki kemasan produk; (iii) menerapkan baku mutu produk; (iv) menetapkan harga produk lebih transparan. Lebih dari itu, plkp yang berjalan dengan baik dinilai akan mendukung pertumbuhan ekonomi petani dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun kenyataannya, plkp Sumatera Barat masih menemui kendala, baik kendala teknis-

¹ Plkp dikenal dalam 2 (dua) jenis, *spot* dan *forward*. Pada plkp *spot*, penjual langsung membawa komoditas pertanian yang akan dijual ke pasar lelang. Pada plkp *forward*, penjual cukup membawa contoh komoditas pertanian yang akan dijual, penyerahan dan penyelesaiannya (termasuk pembayarannya) kemudian sesuai dengan perjanjian jual-beli kedua belah pihak.

² Plkp menjadi amat penting karena Sumatera Barat merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia Bagian Barat, yang pada 2015 akan masuk ke dalam era *Asean single market and production: free flow of goods, free flow of services; free flow of investment; free flow of capital; free flow of skilled labor* (Deplu RI, 2008b).

fungsional berupa kesulitan dalam pelaksanaannya maupun kendala yang lebih fundamental berupa kesulitan dalam mereposisi diri agar benar-benar berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan khususnya petani.

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan sejumlah hal terkait dengan promosi plkp Sumatera Barat, yaitu tentang potensi produk pertanian Sumatera Barat serta masalah-masalah plkp Sumatera Barat. Tinjauan terhadap masalah plkp dilakukan sampai mengungkapkan fundamental mengapa plkp tidak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, lalu solusi apa yang perlu dilakukan ke depan.

POTENSI PRODUK PERTANIAN SUMATERA BARAT

Potensi pasar produk atau komoditas pertanian Sumatera Barat belum terpetakan dengan baik. Sejumlah yang sering disebut-sebut sebagai produk pertanian primadona seperti gambir, karet dan coklat bahkan juga tidak diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya perkembangan produksinya secara volumetris ataupun nilai transaksinya dari tahun ke tahun. Padahal terdapat juga sejumlah produk pertanian lain yang berkali-kali masuk pasar lelang dengan nilai transaksi yang juga relatif besar. Tahun 2006, 42 jenis produk pertanian Sumatera Barat yang masuk pasar lelang dalam 7 kali pelaksanaannya telah menghasilkan nilai transaksi sekitar Rp 4 milyar lebih. Namun gambaran tersebut tetap tidak bisa memberikan petunjuk tentang perkembangan produk pertanian Sumatera Barat secara valid, lengkap dan utuh, khususnya apabila dikaitkan dengan kegiatan ekspor.

Perkembangan produk pertanian secara nasional pun tidak menggambarkan dengan jelas sehingga tidak bisa diketahui potensinya dalam memasuki pasar global (Martius, 2008 dan Nainggolan 1998). Sepanjang waktu yang lampau

disinyalir bahwa pasar tidak kondusif sehingga produk tradisional (terutama karet, sereal, gula dan minyak nabati) tidak mampu membesar, dan bahkan cenderung tumbuh secara negatif. Tetapi produk non-tradisional (buah-buahan, daging, produk ikan, tembakau dan makanan olahan) masih berpotensi tumbuh dengan cepat. Indikasi ini menunjukkan paradoks terhadap kemauan untuk menerapkan strategi ekspor dan promosi produk pertanian yang menoleh keluar (*outward-looking*). Akibatnya, jangan akan memenuhi permintaan ekspor, kebutuhan dalam negeri saja tidak terpenuhi dan banyak yang masih dipenuhi dari impor. Padahal khusus untuk produk pangan seperti beras, jagung, kedele dan gula tegas-tegas menuntut dukungan strategi menoleh ke dalam (*inward-looking*).

Nilai ekspor produk pertanian Indonesia relatif tidak stabil dan menurun, termasuk produk-produk utama di bidang perkebunan seperti karet, CPO, kopi, kakao, teh, lada, dan seterusnya; bidang perikanan seperti udang, tuna/cakalang, kepiting, kodok, mutiara dan seterusnya; bidang hortikultura seperti pisang, nanas segar, manggis, jamur, kentang dan seterusnya; bidang peternakan seperti babi dan unggas. Kondisi ekspor produk pertanian Sumatera Barat mungkin juga begitu. Itulah sebabnya peluang sektor pertanian menjadi penyelamat krisis finansial sekarang ini semakin kecil, padahal pada saat krisis monev 1997/1998 sektor pertanian mampu menjadi penyelamat dan ekspor produk pertanian saat itu malah relatif baik.

Menurut Rudi Wibowo (Universitas Jember), ketidakmampuan sektor pertanian menjadi penyelamat kali ini ialah karena permintaan pasar internasional terhadap produk pertanian amat menurun. Saat ini memang saatnya pula pasar produk pertanian terpuruk. Ekspor kopi, misalnya, saat ini terhenti. Harga produk pertanian di pasar dunia pun menurun. Harga minyak sawit mentah

(CPO) hanya 700 dollar AS per ton, padahal sebelumnya di atas 1.000 dollar AS per ton. Harga karet alam Rp 5.500 per kg, sebelumnya Rp 9.500 per kg.³

Disamping masalah akibat anjloknya harga dan permintaan pasar dunia, pengembangan potensi produk pertanian di Sumatera Barat ke depan diperkirakan akan menghadapi permasalahan yang sudah umum, yaitu antara lain: baku mutu yang tidak diterapkan secara berdisiplin; adanya larangan ekspor yang ditandai oleh tingginya pajak ekspor; pasar belum terdiversifikasi; pengembangan produk tidak dilakukan; teknis budidaya atau manajemen usaha masih tetap lemah.

Potensi produk pertanian itu sudah ditangani secara khusus sebagianannya melalui kebijakan pengaturan, pengawasan dan pelarangan ekspor. Tujuan kebijakan tersebut tergantung jenis produk dengan kepentingan untuk mencegah agar ekspor tidak di bawah mutu standar dan mempertahankan mutu produk ekspor. Pengaturan bertujuan agar ekspor produk tertentu (misal: kopi dan rotan) diatur supaya: bahan baku bagi industri dalam negeri terjamin ketersediaannya; kelestarian alam; meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Pengawasan bertujuan agar ekspor produk pertanian tertentu (misal: sapi, kerbau, pupuk Urea) diawasi ekspornya untuk menjaga stabilitas pengadaannya bagi konsumsi dalam negeri dan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri. Pelarangan bertujuan agar produk pertanian tertentu (misal: anak ikan, udang galah, udang *Panaedae*, karet bongkah, kulit mentah, kayu bulat) dilarang ekspornya untuk menjaga keles-

tarian alam dan sumberdaya, menjamin standar mutu dan menjamin kebutuhan bahan baku dalam negeri. Kebijakan juga membebaskan untuk ekspor produk pertanian tertentu, yang tidak masuk kelompok pada kelompok diatur, diawasi atau dilarang. Tujuan kebebasan ekspor ini adalah untuk mendorong diversifikasi produk dan meningkat daya saing.⁴

Di Sumatera Barat, kebijakan yang sudah dilakukan adalah pengawasan terhadap produk-produk pertanian ekspor melalui sistem sertifikasi dalam bentuk SM (Sertifikasi Kesesuaian Mutu) yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji mutu atau dalam bentuk SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Sejumlah produk pertanian Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, yang sudah disertifikasikan antara lain: karet SIR (*Standard Indonesia Rubber*); karet konvensional; minyak nilam; cassiavera; kopi; teh; minyak daun cengkeh (?); biji kakao. Khusus untuk gambir, telah diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Agustus 2008) kepada Menteri Perdagangan agar dilakukan pengawasan mutu produknya yang sesuai dengan SNI 01-3391-2000 (sekarang mungkin sudah disetujui).

MASALAH PLKP SUMATERA BARAT

Sejumlah hal yang dapat dinyatakan sebagai masalah atau kelemahan dalam promosi plkp Sumatera Barat awalnya ditandai oleh kedudukan petani di pasar produk pertanian yang lemah dan tanpa perlindungan, dan hal tersebut diikuti pula oleh rendahnya pangsa pasar (*price share*), pendapatan dan sekaligus daya-saing produk pertanian yang dihasilkan petani. Kelemahan ini

³ Situasi ini berbeda dengan 1997/1998, ketika justru harga produk pertanian perkebunan tinggi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan permintaan pasar dunia yang tetap relatif tinggi. Dengan demikian, petani di sejumlah daerah, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, justru banyak yang mendadak kaya (Rudi Wibowo dan M. Maksun, Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17).

⁴ Kebijakan ini bisa ditelusuri pada SK Menteriindag 558/MPP/KEP/12/1998 jo Permendag 01/M-DAG/PER/1/2007; Ekspor Terdaftar Kopi (ETK); Ekspor Terdaftar Rotan (ETR); Ekspor Terdaftar Produk (ETPIK); Surat Persetujuan Ditjen Daglu.

tetap terbawa sampai ke plkp, karena ternyata di plkp petani tetap berlaku sebagai *price taker*, bukan *price maker*.⁵ Kalau di luar plkp petani selalu terkorbankan oleh distorsi pasar atau oleh praktek-praktek *price dumping* yang diprakarsai oleh tengkulak-tengkulak, di dalam plkp ternyata kelembagaan plkp sendiri belum cukup kuat untuk melindungi mereka.⁶ Unsur-unsur pelaku, support dan fasilitator dalam plkp masih belum dapat berjalan efisien dan efektif. Padahal secara teknis, mereka diharapkan dapat mendorong plkp berfungsi sebagai: (i) pemusatan (konsentrasi) perdagangan beragam produk pertanian yang berasal dari berbagai tempat dalam jumlah yang efisien untuk pembentukan harga yang efektif; (ii) pembentukan harga yang transparan, wajar dan menggambarkan kekuatan permintaan dan penawaran dan ditentukan secara tepat melalui lelang; (iii) pendistribusian produk dari produsen ke konsumen secara efisien; (iv) penyelesaian transaksi melalui mekanisme pembayaran dengan

dukungan administrasi pelayanan yang tertib dan perdagangan; (v) pengefisien biaya operasional pemasaran seperti biaya bongkar muat dan penanganan produk; (vi) pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi perdagangan; dan (vii) penyediaan layanan penunjang seperti proses sertifikasi dan pemeriksaan higienes.

Pada pihak pelaku, yang terdiri dari anggota⁷ ataupun penyelenggara lelang, ditemukan beban bagi perkembangan plkp akibat: (i) kurangnya kemampuan mereka dalam mengukur kekuatan diri; (ii) rendahnya komitmen dan kredibilitas mereka; (iii) lemahnya daya prediksi mereka terhadap pasar; dan (iv) mereka belum terbiasa dengan sistem *forward*. Pada pihak fasilitator yang terdiri dari Bappebti, asosiasi, dan pemerintah terlihat pula berbagai kelemahan. Pertama, Bappebti masih belum mampu dalam: (i) menjembatani permasalahan di pasar lelang yang harus diselesaikan dengan lembaga, instansi, atau departemen terkait di tingkat nasional; (ii) mendorong Pemda dalam mengembangkan pasar lelang; (iii) menjalin hubungan harmonis dengan Pemda. Kedua, asosiasi terlihat lalai dalam: (i) menyediakan data-base keanggotaan asosiasi; (ii) memberi informasi harga yang berlaku di pasar; (iii) memberi informasi spesifikasi dan jumlah produk/komoditas yang diperdagangkan oleh anggotanya. Ketiga, pemerintah terlihat masih tidak berdaya untuk: (i) mendorong pertumbuhan pasar lelang; (ii) menginstruksikan Dinas terkait untuk mendukung pengembangan pasar lelang; (iii) menyediakan anggaran untuk pengembangan pasar lelang; dan (iv) mendorong lembaga keuangan/non-keuangan untuk pengembangan pasar lelang. Pihak (peng)support plkp, yang ditopang oleh sejumlah lembaga, terlihat

⁵ Busharmaidi (2007) menggambarkan bahwa pasar produk pertanian tertentu Sumatera Barat berciri eksportir oligopsoni (bahkan cenderung monopsoni), dan ini mengisaratkan mudahnya terjadi kecenderungan bagi eksportir untuk mempunyai posisi mutlak sebagai *price maker* dan keniscayaan para petani sebagai *price taker*. Akibatnya, kesejahteraan petani selalu menjadi kepentingan yang terkesampingkan dalam dan oleh pasar pertanian.

⁶ Kelembagaan perdagangan/ekspor ppsb sering disertai keanehan perilaku bertransaksi. Sebagai contoh, transaksi komoditas gambir antara pelaku-pelaku pasar dapat dengan mudah dilaksanakan di pasar lelang, ketika harga produk gambir relatif rendah. Pelaku-pelaku pasar (eksportir, *provider*/pemerintah, dan bahkan importir) tidak malu tampil dengan identitasnya. Namun ketika harga produk gambir naik, ketika margin tataniaganya bisa dibesarkan, pasar lelang sulit untuk dioperasikan. Pelaku-pelaku pasar, kecuali petani, cenderung menyembunyikan identitas mereka agar bisa berlaku dominan sebagai *price-maker*. Transaksi agresif sering dilakukan oleh perpanjangan tangan para pedagang, para eksportir dan bahkan mungkin juga para importir yang langsung datang ke sentra-sentra produksi dengan petani/produsen.

⁷ Keanggotaan plkp terdiri dari: (i) kelompok petani/usaha; (ii) koperasi; (iii) petani/produsen; (iv) pabrikan; (v) industri; (vi) swalayan; (vii) eksportir dan (viii) pedagang perantara.

kekurangan pada semua lini: logistik, *forwarder*, transport, penjamin, lembaga keuangan, arbitrase, sertifikasi mutu dan informasi (lihat Sunarto, 2007). Misalnya, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) tidak selalu berhasil dalam: (i) mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang *Forward* (PPLF) berlaku tertib; (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PPLF, Lembaga Penjaminan dan pelaku pasar; (iii) menyetujui SOP yang ditetapkan PPLF dan Lembaga Penjaminan; dan (iv) mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran peraturan yang berlaku. Lembaga perbankan belum bisa: (i) membantu penyelesaian transaksi pasar lelang melalui skema transfer dana atau fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri); (ii) menyimpan uang muka dan uang jaminan transaksi, bekerjasama dengan LKP dalam rekening terpisah atas nama masing-masing pelaku; dan (iii) memberi dukungan pembiayaan kepada pelaku pasar, dengan adanya kepastian penyelesaian kontrak jual beli *forward* yang dijamin oleh LKP. Lembaga Sertifikasi Mutu Komoditas, suatu lembaga independen yang dapat menerbitkan sertifikat mutu produk, tidak sepenuhnya dapat memastikan kualitas komoditas; Lembaga penggudangan belum dapat berfungsi menyimpan dan memelihara jumlah maupun mutu produk pertanian yang disimpan; Lembaga asuransi belum bersedia sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap resiko kehilangan, kebakaran dan sebagainya.

Soal plkp Sumatera Barat ke depan juga melekat pada berbagai hal berikut. Pertama karena ekspor yang masih didominasi oleh produk primer, sementara di sisi lain produk agroindustri masih kurang mampu bersaing akibat standar mutunya yang rendah, keragaman kualitas dan tingginya biaya *delivery* dan transportasi. Kedua karena sejumlah produk masih tergantung musim, dan investasi agroindustri kurang menarik karena jangka lebih panjang

dari manufaktur lainnya. Ketiga karena sebagian besar bahan baku agroindustri dihasilkan petani dengan teknologi sederhana, skala kurang ekonomis, dan kurang memperhatikan aspek kualitas (Aisman, 2006).

Penyelenggaraan plkp di Sumatera Barat dihadapkan pada persoalan dari sisi petani maupun dari sisi penyelenggara lelang sendiri (lihat Disperindag Propinsi Sumatera Barat, 2006 dan Hafizah, 2005). Dari sisi petani terlihat adanya: (i) petani produsen (produk sayuran) dan pelaku tataniaga yang masih melakukan cara pemasaran langsung ke pedagang pengumpul di tingkat nagari (desa) atau kecamatan, atau bahkan ke pedagang besar dari pasar induk yang datang ke lokasi produksi (lihat juga Anugrah, 2004); (ii) konvensi atau kontrak penjualan produk kepada pedagang-pedagang akibat ketergantungan petani kepada mereka dalam penyediaan permodalan usahatani; (iii) jaminan penampungan dan produk oleh pedagang-pedagang yang lebih baik daripada jaminan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan; dan (iv) keterbatasan skala penyediaan komoditas (akibat kecilnya skala usahatani) yang menyebabkan rendahnya posisi tawar-menawar petani di pasar lelang.

Persoalan yang dihadapi penyelenggara meliputi: (i) keterbatasan prasarana; (ii) tempat penyelenggaraan yang cenderung eksklusif (di hotel), disamping mahal juga jauh dari jangkauan petani; (iii) sumberdaya manusia penyelenggara lelang terbatas: pemandu lelang, operator komputer, tanaga pemandu pengisian formulir; (iv) legalitas organisasi penyelenggara, memerlukan Keputusan Gubernur; dan (v) belum adanya ekstra institusi semacam komite arbitrase yang akan menangani masalah pascalelang (Disperindag Propinsi Sumatera Barat, 2006).

Dari sisi proses (pasar lelang) terlihat: (i) keberadaan dan fungsi pasar lelang seringkali kurang strategis, atau

juga belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku-pelaku pasar, khususnya kepada petani (lihat Hafizah, 2005). Muncul saran untuk mengembangkan strategi pasar lelang, misalnya sekaligus dengan menggunakan sistem elektronik *E-Commerce*, namun metoda ini ternyata tidak sederhana dan masih jauh dari jangkauan petani, baik secara fisik, baik secara fisik, apalagi secara keopentingan. Dengan begitu, pemanfaatan *E-Commerce* justru dinilai kontroversial, dan akan menjadi kontradiksi terhadap kesejahteraan petani (lihat Kesuma, n.d.).

Sehubungan dengan hal-hal sebelumnya, dapat dibayangkan magnitud persoalan plkp ketika Piagam Asean sudah dijalankan dengan wujud terbentuknya *Asean Economic Community* (AEC, 2005). Tantangan penyelenggaraan plkp akan semakin berat karena secara otomatis akan terintegrasi ke dalam pasar regional maupun internasional. Lalu apa yang mesti dipersiapkan secara bersama. Jawaban generiknya adalah kerjasama antar sesama negara Asean itu sendiri. Soalnya adalah bagaimana menumbuhkan kerjasama antara pelaku-pelaku (termasuk pemerintah dan asosiasi-asosiasi terkait) dalam plkp itu sendiri terlebih dahulu? Jangan harap pelaku-pelaku lokal, khususnya petani, akan survive dalam plkp yang terintegrasi dalam struktur tunggal Asean, apabila kerjasama tersebut tidak dapat ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh.

SOLUSI KE DEPAN

Ada dua perspektif yang dapat dipakai dalam mempromosikan produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat. Pertama adalah perspektif produksi dan bisnis yang diletakkan dalam sistem agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah produk pertanian. Sistem agribisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa subsistem: praproduksi (*upstream agribusiness*), produksi (*on-farm agribusiness*), pascaproduksi (*downstream agribusi-*

ness) dan pendukung (*supporting agribusiness*) seperti teknologi, penelitian dan pengembangan. Kedua adalah perspektif kesejahteraan yang diletakkan dalam sistem perekonomian masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, termasuk petani. Sistem perekonomian masyarakat ini hanya terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem produksi dan subsistem redistribusi. Subsistem produksi menyangkut upaya transformasi sumberdaya pertanian untuk menghasilkan nilai produk pertanian (nilai ekonomi dan kekayaan) yang berguna untuk mendukung kehidupan rakyat keseluruhan. Subsistem redistribusi, merupakan kontrak sosial, adalah upaya mendaur-ulang (relokasi) kekayaan yang dihasilkan pada dan oleh subsistem produksi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat keseluruhan (termasuk petani) secara adil.

Keberhasilan pengembangan produk pertanian dan plkp harus dapat ditinjau menurut dua perspektif di atas secara terkombinasi. Perspektif pertama yang walau langsung berkenaan dengan pertumbuhan produk pertanian tetapi bersifat mikro dan parsial sehingga tidak otomatis dapat dipakai untuk memproyeksikan seberapa jauh kesejahteraan petani dapat dijamin tercapai. Sebaliknya, dengan perspektif yang kedua, ekonomi masyarakat direkayasa berkembang secara saling berkait—yakni dengan redistribusi kekayaan (ekonomi) masyarakat, terutama apabila kesejahteraan petani tidak kunjung meningkat melalui skenario penciptaan nilai (tambah) produk pertanian. Semangat petani untuk berproduksi dapat bertahan dan bahkan dapat meningkat apabila tingkat kesejahteraan petani terpelihara.

Secara paralel, strategi pengembangan dan promosi produk pertanian dan plkp di Sumatera Barat juga bisa dijalankan dalam kombinasi kedua perspektif di atas agar selalu memihak kepada petani dan tidak insubordinatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan

mereka. Suatu plkp yang ideal merupakan sebuah *sustainable system*, yaitu sistem penghasil output yang lebih besar atau cukup untuk dapat menutupi fungsi-fungsi pertumbuhan, reproduksi dan pemeliharaan plkp (sebuah pasar). Dalam suatu tipologi plkp ideal seperti ini, seluruh pelaku pasar, baik yang langsung seperti petani dan pedagang maupun yang tidak langsung seperti pemerintah, akan diuntungkan (lihat Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi).

Penyelenggaraan plkp masih cukup realistis apabila petani dan pedagang (atau petani saja) masih bisa meraih keuntungan dari dan oleh transaksi plkp. Dalam kondisi tersebut sesungguhnya pemerintah tidak dirugikan, karena masih akan tetap memperoleh manfaat tidak langsung dari eksistensi pertanian dan kegiatan-kegiatan petani, dengan asumsi bahwa apabila pertanian terdegradasi akan berimplikasi kepada ekonomi masyarakat secara keseluruhan—pemerintah justru akan menerima resiko atau konsekuensi yang lebih besar. Pemerintah cukuplah dipuaskan oleh efek multiplier keberlanjutan kegiatan pertanian terhadap ekonomi nasional atau daerah secara umum. Dengan begitu, pemerintah mesti selalu mengembangkan sistem, kebijakan, program perlindungan sosial kepada petani dengan memberikan kompensasi ataupun subsidi kepada petani.

Idealisasi plkp mempunyai maksud mengintegrasikan fungsi-fungsi plkp ke dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, yaitu dengan mengakui bahwa pemerintah, Bappepti maupun asosiasi (swasta) adalah juga pelaku plkp, selain pedagang dan petani, dalam sebuah sistem plkp. Dengan begitu, struktur peran atau fungsi aktual yang menyangkut pembagian hak dan kewajiban masing-masing pelaku pada plkp (Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp) dapat dikaji secara terbuka dan selanjutnya dapat pula dikoreksi secara lebih rasi-

onal dalam kerangka konsistensi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Jika plkp ideal tidak terwujudkan, berarti plkp berjalan tidak efisien dan tidak efektif. Disamping tidak mampu memberi keuntungan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh pasar konvensional, transaksi pada plkp malahan bisa menjadi ancaman terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada satu sisi, pedagang dapat memposisikan diri sebagai penentu harga di plkp sehingga berpeluang untuk menjadi penerima manfaat utama. Sementara itu, pada sisi yang lain, petani dengan segala keterbatasannya untuk dapat bertransaksi secara rasional terpaksa menjadi penerima harga. Jikapun petani masih bisa beruntung, namun biasanya akan tertekan sampai pada penerimaan manfaat minimum untuk sekedar survive.

Di sinilah letak perlunya prinsip kepemilikan kepada petani. Transaksi pada plkp yang sudah dan akan tetap berlangsung pada dasarnya tetap tidak boleh merugikan petani. Petani harus diproteksi.⁸ Setiap kerugian petani yang muncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompensasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual (*selling hedge*) bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penurunan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

⁸ Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibebaskan dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraannya (dekomodifikasi), yaitu dengan menjadikannya sebagai hak sebagai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

Di sinilah letak perlunya prinsip pada plkp yang sudah dan akan tetap berkepemihakan kepada petani. Transaksi

Tabel 1: Pasar lelang ideal, yang terintegrasi

Tipologi	Pelaku PLKP			Muatan Kebijakan
	Petani Produsen	Pedagang	Pemerintah	
Ideal	Untung (pembayar pajak)	Untung (pembayar pajak)	Untung (penerima pajak)	Orientasi plkp
Realistis	Untung (Penerima kompensasi dan subsidi)	Untung (penerima subsidi)	Rugi (pembayar kompensasi dan subsidi)	Proteksi petani dan tengkulak
Tidak Ideal	Untung (penerima kompensasi dan subsidi)	Rugi (pembayar kompensasi dan subsidi)		Proteksi petani
	Rugi	Rugi	Rugi	---

Tabel 2: Struktur fungsi aktual pada plkp

Pelaku	Fungsi-Fungsi Aktual PLKP		
	Pra-Transaksi	Transaksi	Pasca-Transaksi
<u>Fasilitator:</u> 1. Pemerintah 2. Bappepti 3. Asosiasi	-provisi pembentukan plkp (<i>backward provision</i>): regulator; fasilitator -pembangun prasarana plkp -pengembang dan pemasok teknologi plkp	-provisi kegiatan plkp: regulator; koordinator; fasilitator; mediator -pendukung plkp (misal: pendataan, penjaminan dan arbitrase untuk plkp)	-provisi untuk agregasi dan distribusi kemanfaatan plkp (<i>forward provision</i>): regulator; fasilitator -penerima manfaat plkp, dari penerimaan pajak
<u>Swasta:</u> (pedagang, juga lembaga paras-tatal Bulog)	(secara terbatas) dituntut berperan sebagai <i>support</i> dan fasilitator plkp	-pembeli masif produk pertanian -penentu harga transaksi plkp	-penerima manfaat plkp, dari perdagangan produk pertanian
<u>Petani</u>	---	-produsen dan sekaligus penjual produk pertanian -penerima harga transaksi plkp	-penerima manfaat gurem, dari penjualan produk pertanian di plkp -bisa sebagai penerima dampak (negatif) langsung dari transaksi di plkp

langsung pada dasarnya tetap tidak boleh merugikan petani. Petani harus diproteksi.⁹ Setiap kerugian petani yang

⁹ Upaya proteksi paling jauh terhadap petani adalah dalam konstruksi negara kesejahteraan. Petani dibebaskan dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraannya (dekomodifikasi), yaitu dengan menjadikannya sebagai hak sebagai warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan

muncul dari penyelenggaraan plkp harus dibebankan kepada pemerintah (APBN/APND), sebagai pembayaran kompensasi atau subsidi untuk petani. Salah satu yang sudah biasa dilakukan ialah dengan adanya Lindung Nilai Jual

sosial yang disediakan oleh negara (Triwibowo dan Bahagijo, 2006).

(*selling hedge*) bagi petani untuk memperkuat posisi jual petani plkp dengan tujuan perlindungan petani dari kemungkinan instabilitas dan penurunan harga produk pertanian (Jamil, 2006).

CATATAN PENUTUP

Tantangan dalam pengembangan plkp mungkin lebih banyak soal teknis-fungsional saja. Namun kalau diletakkan dalam kepentingan untuk menyejahterakan rakyat dan khususnya petani, maka yang perlu diperhatikan bukan lagi bersangkut-paut dengan soal teknis pelaksanaan pasar lelang, melainkan juga soal redistribusi ekonomi. Dalam kegiatan plkp perlu diskenariokan agar petani dapat ambil bagian yang konkrit dengan memperoleh kompensasi ataupun subsidi, sekalipun tipologi plkp yang berlangsung tidak ideal dalam arti akan merugikan sejumlah pihak selain petani. Olehsebab itu, seluruh beban yang muncul dari rekayasa atau skenario ini harus di-bebankan pada anggaran negara (APBN/APBD).

KEPUSTAKAAN

- _____. 2007. "Kebijakan Umum Ekspor." Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- Deplu RI. 2008a. *Asean Charter*. Direktorat Jenderal Kerjasama Asean, Deplu RI.
- Deplu RI. 2008b. *Asean Economic Community Blueprint*. Direktur Jenderal Kerjasama Asean, Deplu RI.
- Anugerah, Iwan Setiajie. 2004. "Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Lelang Komoditas Pertanian dan Permasalahannya." *Forum Penelitian Agro Ekonomika*, Vol. 22, No. 2, Desember 2004 (hal. 102-112).
- Ariani, Dorothea Wahyu. 1999. *Manajemen Kualitas*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Departemen Perdagangan RI. 2006. "Pengembangan Pasar Lelang di Indonesia dan Profilnya Saat Ini." Disampaikan dalam *Seminar Implementasi Dukungan Pendanaan bagi Pelaku Pasar Lelang*, Bappepti, Batam, 18 September 2006.
- Disperindag Propinsi Sumatera Barat. 2006. "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pasar Lelang 2006." Subdin Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Propinsi Sumatera Barat.
- Hafizah, Dian. 2005. "Evaluasi Pelaksanaan Pasar Lelang Cassiavera Guguk Kaitiran di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar." *Skripsi S1 Fakultas Pertanian Unand*.
- Jamil, Afrizal. 2006. "Peranan KADIN dalam Meningkatkan Pasar Lelang Masa Depan Sumatera Barat." Tulisan yang disampaikan pada *Sosialisasi Pasar Lelang Sumatera Barat*, 23 Mai 2006 di Hotel Inna Muaro Padang.
- Kesuma, Mayun Darma. n.d.
- Kompas 21 Agustus 2008, hal. 21.
- Kompas 29 Oktober 2008, hal. 17.
- Martius, Endry. 2008. "Keadilan Agraris." Tulisan pembahasan pada *Seminar Kesiapan Sektor Pertanian Indonesia Menyongsong Terbentuknya Komunitas ASEAN 2015*, yang diselenggarakan Ditjen Kerjasama ASEAN, Deplu RI, di Bukittinggi, 24 Mai 2008.
- Martius, Endry. 2008. "Kemitraan Agribisnis untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat." *Jurnal Agribisnis Kerakyatan (JAK)*, No. 1, Tahun 1, Juli 2008.
- Martius, Endry. 2006. "Rekonstruksi Sistem Ekonomi Nagari." *Buletin Nagari*, No. II Tahun 2006.
- Nainggolan, Kaman. 1998. "Strategi Pemasaran Ekspor Pertanian." *AgroEkonomika*, No. 2, Tahun XXVIII, Oktober 1998.
- Sunarto, Edi. 2007. "Pasar Lelang sebagai Sarana Pengembangan Usaha." *Hand-out* pada Penyusunan Program Kerja Lelang Daerah 2008 dan Temu Teknis Penyelenggara Pasar Lelang, Batam, 09 Juli 2007.
- Susanto, A.B.; Sujanto, F.X.; dkk. 2008. *A Strategic Management Approach: Corporate Culture & Organization*

Culture. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.

Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugen. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.



ANALISA USAHATANI TANAMAN PISANG BIBIT KULTUR JARINGAN YANG DIBERI FUNGSI MIKORIZA ARBUSCULA (FMA) PADA KELOMPOK TANI MITRA TANI DI KANAGARIAN TABEL PANJANG KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

Zelfi Zakir, Rina Sari dan Riki Chandra

Abstract: Conducted in May-July 2008, the study aims (1) to depict the cultural-practices of banana's plant biotechnology carried out by Faculty of Agriculture Andalas University, and (2) to analyze the income dan profit stemming from the banana's farming. Since the cultural-practices had been fully planned and undercontrol, the banana's farm had successfully generated income and profit.

Kata Kunci: analisa usaha, pisang, kultur jaringan, mikoriza

PENDAHULUAN

Pisang (*musa paradisiaca*, L) adalah salah satu tanaman buah yang digemari oleh sebagian besar penduduk dunia karena rasanya enak, kandungan gizinya ting-gi, mudah didapat, dan harganya relatif murah (Suyanti dan Ahmad, 1994). Pisang jenis buah tropis yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikelola secara intensif dengan orientasi agribisnis (Rukmana, 1999).

Di Indonesia pisang merupakan tanaman yang masih banyak nilai ekonominya belum berkembang, karena belum dilakukan secara agribisnis, dan peranan tanaman pisang masih sebagai tanaman pelengkap dalam skala rumah tangga atau kebun yang sangat kecil. Standar internasional perkebunan pisang kecil adalah 10-30 Ha (Balitbu, 1996).

Sebagai negara tropik yang kondisi lingkungannya cocok untuk budidaya pisang, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan

dalam skala agribisnis yang berorientasi pada pasar ekspor, karena selain dalam bentuk segar, pisang juga mempunyai potensi yang besar sebagai bahan baku atau bentuk lainnya (Balitbu, 1996). Tanaman pisang juga tumbuh dan berkembang didaerah tropis hampir seluruh pelosok di Indonesia. Potensi hasil pisang merupakan salah satu sumber devisa bagi negara yang tidak boleh diabaikan (Rismunandar, 1986).

Sumatera Barat merupakan salah satu sentra produksi pisang di Indonesia, produksi tanaman pisang yang dihasilkan oleh propinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang sangat besar dimana tahun 2006 produksi pisang sebanyak 39.132 ton dan tahun 2007 produksi pisang naik menjadi 62.129 ton (Lampiran 3) atau terjadi kenaikan sebanyak 22.997 ton atau sebesar 58,77%.

Pengembangan pisang yang dilakukan juga akan membawa dampak bagi setiap rantai yang

Zelfi Zakir dan Rina Sari adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Riki Chandra adalah Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

terkait, sehingga perlu dipikirkan pengembangan dengan sistem agribisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan ekonomis, serta dapat melihat adanya peluang, potensi dan kendala yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi produsen ataupun industri pengolahan, sedangkan bagi konsumen diharapkan dapat memperbaiki pengembangan gizi dalam pola makannya. Penyediaan bibit bermutu melalui teknik kultur jaringan (*in vitro*) merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan budidaya pisang. Penggunaan bibit bermutu dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman, kualitas dan produktivitas tanaman hilirnya yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani (Balitbu, 1996).

PERUMUSAN MASALAH

Kecamatan Baso Kabupaten Agam adalah salah satu daerah sentra produksi pisang di Sumatera Barat. Kecamatan Baso juga merupakan salah satu daerah yang memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan pisang cukup bagus, tetapi kesempatan hama dan penyakit untuk menyerang tanaman pisang juga cukup tinggi. Beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman pisang di daerah ini adalah penyakit layu fusarium, penyakit darah bakteri, dan penyakit penggerek bonggol. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh jamur *fusarium oxysparum* f. sp. *cubense* yang merupakan jamur tular tanah. Penyakit ini dapat berkembang dengan baik pada suhu 21-33°C dengan suhu optimum 28°C, dan pada pH tanah yang

rendah yaitu pada $\text{pH} \leq 6$ (Semanungun, 1989). Penyakit darah bakteri merupakan penyakit yang bersifat sistematik, sangat berbahaya pada tanaman pisang karena penyakit ini dapat mematikan tanaman (Sulyo, 1992).

Dalam rangka pengembangan lahan endemik akibat penyakit layu fusarium, penyakit darah bakteri dan penggerek bonggol, pemerintah ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya kebijakan pertanian yaitu dengan menciptakan suatu teknologi pembibitan melalui lembaga riset dan teknologi yang disebut dengan teknik kultur jaringan (*in vitro*). Bibit pisang kultur jaringan ini dipilih karena bibit tersebut memiliki keunggulan diantaranya bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit karena dalam proses pembibitan tanaman pisang tersebut bebas dari gangguan hama, penyakit dan deraan lingkungan lainnya. Selain itu bibit yang dihasilkan juga seragam dan pembibitannya tidak tergantung musim atau dapat dibibitkan kapan saja. Dalam rangka menguji dan menerapkan teknologi ini ke lahan terbuka, pemerintah menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Andalas (FPUA) untuk melaksanakan proyek ini, bekerja sama dengan sebuah kelompok tani yang berada di Kanagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso, yang bernama Kelompok Tani Mitra Tani sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja. Peneliti FPUA mengarahkan dan mengawasi proses budidaya pisang yang lebih efektif dan efisien kepada petani serta penyandang dana.

Penelitian ini dimulai 1 Januari 2007. Jenis bibit pisang kultur jaringan yang ditanam adalah pisang Kepok dan pisang Tanduk. Kedua jenis pisang ini ditanam

dengan menggunakan pola tanam ‘Polikultur’ yaitu menanam kedua jenis pisang itu pada satu lahan yang sama. Bibit yang ditanam digunakan sampai 3 kali panen; dengan satu bibit ini akan dipelihara 2 anakan. Apabila kedua anakan tersebut telah dipanen maka seluruh tanaman ini harus dibabat habis dan dibongkar sampai umbinya. Sebelum ditanami bibit pisang baru, lahan ditanami terlebih dahulu dengan tanaman jagung dan ubi jalar. Tujuannya adalah agar bakteri, mikroba, dan bibit penyakit yang terdapat di dalam tanah yang dibawa atau ditinggalkan oleh tanaman pisang sebelumnya dapat dilumpuhkan oleh antibakteri yang terdapat pada tanaman jagung dan ubi jalar.

Dengan banyaknya penyakit layu fusarium yang menyerang tanaman pisang, maka muncul pertanyaan: (1) apakah teknik budidaya yang dilakukan oleh pihak FPUA sudah merupakan teknik budidaya yang tepat untuk mengatasi penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, (2) dan apakah usahatani tanaman pisang dengan menggunakan bibit kultur jaringan dan pengontrolan pihak FPUA itu bisa memberikan keuntungan secara finansial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan teknik budidaya tanaman pisang kultur jaringan yang dilakukan oleh FPUA serta menganalisis pendapatan dan keuntungan usahatannya untuk satu kali periode panen. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan, informasi serta saran yang bermanfaat bagi kelompok tani Mitra Tani dan masyarakat setempat tentang budidaya tanaman pisang yang baik.

METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Berdasarkan pendapat Daniel (2002), dengan studi kasus telah diperoleh gambaran detil tentang latar belakang, sifat-sifat atau karakteristik yang khas dari kegiatan budidaya pisang teknik in vitro yang menggunakan metode organik (memanfaatkan LMA) serta penilaian keuntungan usaha.

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini tidak menggunakan sampel untuk menggambarkan suatu populasi, seluruh anggota Kelompok Tani Mitra Tani yang diberi kepercayaan oleh FP-UA untuk menjalankan usahatani pisang tersebut adalah objek langsung yang dijadikan sumber data, terutama data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Keadaan Geografis dan Topografi

Nagari Tabek Panjang merupakan salah satu Nagari di wilayah Kecamatan Baso, mempunyai luas wilayah $\pm 19,19$ Km², dan daerah ini merupakan daerah yang paling luas di Kecamatan Baso (Lampiran 7). Batasan Nagari Tabek Panjang adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Baru dan Salo, sebelah Selatan dengan Nagari Koto Tinggi, sebelah Barat dengan Nagari Simarasok, dan sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek.

Nagari Tabek Panjang memiliki topografi datar dengan ketinggian dari permukaan laut 879-909 m, temperatur daerah ini berkisar antara 26-30° C, kecepatan anginnya rata-rata 20 Km/jam. Curah hujan dinagari ini 1500-2000 mm/tahun.

Menurut Bappenas (2000), iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. Curah hujan optimal adalah 1.520-3.800 mm/tahun dengan 2 bulan kering. Variasi curah hujan harus diimbangi dengan ketinggian air tanah agar tanah tidak tergenang. Tanaman ini toleran akan ketinggian dan kekeringan. Di Indonesia umumnya dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 2.000 m dpl. Pisang ambon, nangka dan tanduk tumbuh baik sampai ketinggian 1.000 m dari permukaan laut.

Kondisi Demografi

Penduduk Nagari Tabek Panjang berjumlah 9.151 jiwa dengan perincian laki-laki 4.484 jiwa dan perempuan sebanyak 4667 jiwa. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, yang mengusahakan sawah maupun lahan kering, beternak, dan jenis usaha lain, jelasnya pada Tabel 1.

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, Nagari Tabek Panjang telah memiliki sejumlah sarana dan prasarana penunjang seperti Koperasi, kelompok Tani, kelompok Peternak, serta lembaga keuangan seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 1 unit, 1 unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan 1 unit LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis). Kondisi jalan yang cukup baik

dan tersedianya sarana untuk telekomunikasi memudahkan akses masyarakat Nagari dengan daerah sekitarnya, sehingga pemasaran pisang ke pasar Baso yang berjarak ± 2 Km dari nagari Tabek Panjang dapat berjalan dengan lancar.

Kerjasama FPUA dengan Kelompok Tani Mitra Tani

Penelitian yang dilaksanakan oleh pihak Fakultas Pertanian Universitas Andalas (FPUA) mengenai usahatani tanaman pisang mengambil lokasi didaerah endemik yang sering terserang penyakit layu fusarium yaitu di daerah Kanagarian Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam. FP-UA bekerjasama dengan kelompok tani yang bernama Mitra Tani, sebagai bahan percobaan dan penelitian. Dalam kerjasama antara FP-UA dengan Kelompok Tani Mitra Tani ada kewajiban dan hak yang harus disepakati.

Kewajiban dan Hak FPUA

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh FPUA adalah penelitiannya di lahan Kelompok Tani Mitra Tani yaitu sebagai penyandang dana (penyedia modal usahatani) untuk kegiatan baik dalam pembelian saprodi maupun untuk upah tenaga kerja, kemudian mengarahkan dan mengawasi kegiatan teknis budidaya tanaman pisang. Sedangkan hak yang harus diterima oleh FPUA adalah panen pertama karena beberapa tandan pisang yang diperoleh pada periode panen pertama digunakan sebagai sampel bahan penelitian lebih lanjut di laboratorium FPUA. Sedangkan sisa pada periode panen pertama diserahkan kepada masyarakat, begitu juga untuk periode panen berikutnya.

Tabel 1. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Nagari Tabek Panjang

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	(%)
1.	Sektor Pemerintahan	428	7,48
2.	Sektor Pertanian	3.826	66,90
3.	Sektor Perdagangan	405	7,08
4.	Sektor Jasa	925	16,17
5.	Sektor Industri	135	2,36
Jumlah		5.719	100,00

Sumber: Kantor Wali Nagari Tabek Panjang, 2006

Kewajiban dan Hak Kelompok Tani Mitra Tani

Kewajiban kelompok tani Mitra Tani adalah menyediakan tempat sebagai lahan demplot penelitian, menyediakan faktor produksi seperti lahan dan tenaga kerja, melaksanakan teknis budidaya tanaman pisang yang dianjurkan oleh FPUA untuk satu periode produksi (Januari 2007-Juni 2008). Sedangkan hak kelompok tani adalah memperoleh sebagian hasil panen FPUA pada periode panen pertama dan melanjutkan usahatani tanaman pisang tersebut untuk periode berikutnya. Setelah tanaman pisang ditebang habis, maka lahan yang digunakan sebagai demplot penelitian dikembalikan kepada pemiliknya.

Pelaksanaan Budidaya Tanaman Pisang

Persiapan Lahan

Kegiatan yang dilakukan saat persiapan lahan adalah pembukaan lahan, membasmi dan membersihkan gulma atau semak-semak yang tumbuh disekitar lahan. Kemudian tanah yang masih dalam kondisi padat digemburkan dengan cara membolak-balik tanah.

Penyiapan Bibit

Dalam penelitian bibit pisang kepok dan bibit pisang tanduk disiapkan satu minggu sebelum tanam, yang dibeli pada pusat penelitian riset dan teknologi DAVA Bogor. Sebelum bibit ini siap untuk beradaptasi di lahan terbuka terlebih dahulu dipelihara dalam rumah kaca Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Pertanian Unand dan diberi mikoriza (FMA) dengan dosis 10 gr/tanaman, tujuannya supaya bibit tanaman pisang tersebut tahan terhadap serangan penyakit. Pada saat bibit telah berumur 5 bulan dan memiliki daun 8 helai maka bibit ini sudah bisa ditanam pada lingkungan atau lahan terbuka.

Pengolahan tanah

a. Pengukuran jarak tanam

Jarak tanam yang dipakai dalam penelitian ini adalah 3m x 3m. Jarak tanam 3 x 3m untuk tanah sedang dan 3,3 x 3,3m untuk tanah berat (Bappenas,2000). Tanah di daerah Baso ini termasuk jenis tanah sedang.

b. Pembuatan lobang tanam

Lebar lobang tanam yang dipakai adalah 60cm x 60cm dengan kedalaman 50 cm. Menurut Sahutu dan Ahmad (1994) ukuran lobang tanam yang ideal adalah 60 x 60 cm x 50 cm.

Penanaman

Setelah lobang tanam dibuat bibit pisang yang telah dipersiapkan langsung ditanam ke lobang tanam. Penanaman pisang dilakukan 4 hari setelah pembuatan lubang tanam agar pupuk kandang dan hijau (titonia) benar-benar aman dipakai. Pola tanam yang dipakai adalah sistem Polikultur, dimana bibit pisang kepok dan bibit pisang tanduk ditanam pada satu lahan yang sama. Penanaman dilakukan secara selang-seling antara kedua jenis pisang tersebut.

Pemupukan

Pemupukan dilakukan dua kali setahun yaitu, pertama saat tanam, sebanyak 3,5 kg pupuk kandang dan 1,5 kg pupuk hijau per lubang tanam. Pemupukan kedua dilakukan 3 bulan setelah tanam diberi pupuk NPK Mutiara dengan 0,5 (50 %) dosis.

Pemeliharaan

a. Penjarangan

Penjarangan merupakan kegiatan mengatur jumlah anakan yang akan dipelihara untuk panen berikutnya. Jumlah anakan yang dipelihara sebanyak 2 batang atau untuk dua kali panen berikutnya. Apabila masih ada anak tanaman pisang yang akan tumbuh, maka anak pisang tersebut langsung ditebang.

b. Penyiangan

Kegiatan penyiangan adalah membuang rumput dan gulma yang tumbuh di sekitar rumpun tanaman pisang, dilakukan bersamaan dengan kegiatan penggemburan dan penimbunan dapuran atau sekeliling rumpun tanaman pisang dengan tanah. Penyiangan dan penggemburan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

c. Perempalan

Kegiatan perempalan dilakukan apabila daun-daun tanaman pisang sudah mulai mengering kemudian dipangkas, agar kebersihan tanaman dan sanitasi lingkungan terjaga.

d. Pemeliharaan buah

Kegiatan dalam pemeliharaan buah yang dilakukan adalah pemotongan jantung pisang dan pembungkusan buah pisang. Dalam kegiatan pemotongan jantung, jantung pisang yang akan dipotong adalah jantung pisang yang telah berjarak lebih kurang 25 cm dari sisir buah pisang yang terakhir. Tujuan dari pemotongan jantung pisang agar pertumbuhan buah pisang tidak terhambat.

Setelah jantung pisang dipotong dan buahnya telah mengembang sempurna, kegiatan selanjutnya adalah membungkus atau menutup buah pisang tersebut dengan plastik bening keseluruhannya. Tujuannya agar hama dan penyakit yang dibawa oleh serangga maupun angin tidak pindah ke tanaman pisang tersebut. Kantung plastik yang digunakan kantung plastik politilen dengan ketebalan 0,5 mm diberi lobang 1,25 cm, jarak tiap lubang 7,5 cm. Ukuran katong plastik adalah sedemikian rupa sehingga menutupi 15-45 cm diatas pangkal sisir teratas dan 25 cm dibawah ujung buah dari sisir terbawah. Untuk menjaga agar tanaman tidak tumbang akibat beratnya tandan, batang tanaman disangga dengan bambu yang dibenamkan sedalam 30 cm ke dalam tanah.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Dalam penelitian ini untuk pengendalian hama dan penyakit tidak menggunakan pestisida dan

insektisida. Pengendaliannya hanya dengan memperhatikan kebersihan alat yang akan dipakai, terlebih dahulu harus dicuci dengan larutan desinfektan seperti *By Clean*. Selain kebersihan alat, kebersihan lingkungan sekitar tanaman pisang juga harus diperhatikan, seperti gulma dan rumput yang sudah tumbuh harus segera dibersihkan dengan cara melakukan penyiangan rutin sekali tiga bulan.

Pemanenan

Pada umur satu tahun, rata-rata tanaman pisang sudah berbuah. Waktu panen ditentukan oleh umur dan bentuk buah pisang. Buah yang cukup matang untuk dipanen berumur 80-100 hari dengan kondisi buahnya sudah bulat dan berisi. Ciri khas panen lainnya adalah mengeringnya daun bendera. Penentuan umur panen harus didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan untuk pengangkutan buah ke daerah penjualan sehingga buah tidak terlalu matang saat sampai ditangan konsumen. Sedikitnya buah pisang masih tahan disimpan 10 hari setelah diterima konsumen.

Pengadaan Sarana Produksi

Bibit

Varietas pisang yang digunakan adalah varietas pisang kepok dan pisang tanduk. Kultur jaringan yang dibeli dari lembaga riset dan penelitian DAVA, Bogor yang telah berumur 2 bulan. Setelah bibit berumur 4 bulan, bibit tersebut dibawa lahan terbuka atau ke rumah kawat, tujuannya agar bibit tersebut biasa beradaptasi dengan lingkungan. Apabila bibit yang ditanam sudah berumur 5 bulan yang memiliki ciri-ciri yaitu tinggi bibit \pm 60 cm dengan jumlah daun

8 helai dan telah diberi mikoriza, bibit tersebut siap untuk ditanam di lahan terbuka.

Pupuk

Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk kandang dan tironia, sedangkan pupuk anorganik yang dipakai adalah pupuk NPK mutiara. Jelasnya lihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa penggunaan pupuk yang diterapkan oleh pihak FP-UA lebih banyak menggunakan pupuk organik, dimana pupuk kandang yang digunakan sebanyak 65,30 % dan Tironia sebanyak 27,98 % dengan total penggunaan sebanyak 93,28%. Sedangkan penggunaan pupuk anorganik hanya sebanyak 6,72% ini merupakan penggunaan pupuk anorganik yang sangat sedikit. Jika dibandingkan pemakaian kedua pupuk tersebut memiliki kombinasi perbandingan 1:13. Dengan demikian pisang yang dihasilkan oleh FP-UA ini merupakan produk pisang organik.

Tenaga kerja

Tenaga kerja yang digunakan seluruhnya berasal dari tenagakerja luar keluarga (TKLK). Tenaga kerja yang dihitung adalah yang digunakan dalam seluruh aktivitas usahatani pisang mulai dari pengolahan tanah sampai pasca panen.

Sistem pembayaran tenaga kerja yang dilakukan dalam usahatani tanaman pisang ini berupa sistem borongan, sehingga perhitungan biayanya dijadikan ke HKP (Hari Kerja Pria) dengan cara membagi jumlah upah borongan dengan jumlah hari kerja pria yaitu tujuh jam per hari. Jelasnya pada Tabel 3.

Tabel 2. Penggunaan Pupuk Periode Panen Pertama (per 0,5 Ha)

No	Jenis Pupuk	Jumlah (Kg/Ha)	Pemakaian (%)
1	Pupuk Organik		
	a. Pupuk Kandang	647,50	65,30
	b. Titonia	277,50	27,98
2	Pupuk Anorganik * NPK Mutiara	66,60	6,72
Jumlah		991,60	100,00

Tabel 3. Penggunaan Tenaga Kerja Periode Panen Pertama

No	Jenis Kegiatan	Jml Pemakaian (HKP/0,5Ha)	Pemakaian (%)
1	Persiapan Lahan: Pembukaan dan Pembersihan	9,915	9,98
2	Penyiapan Bibit	1,655	1,67
3	Pengolahan Tanah		
	-Pengukuran Jarak Tananam	2,475	2,49
	-Pembuatan Lobang Tanam	9,090	9,15
4	Penanaman	3,305	3,33
5	Pemupukan		
	-Pemupukan I	3,470	3,49
	-Pemupukan II	4,960	4,99
6	Pemeliharaan		
	-Penjarangan	12,050	12,13
	-Penyiangan	19,320	19,44
	-Perempalan	6,630	6,67
6	Pemeliharaan Buah		
	-Pemotongan Jantung	1,320	1,33
	-Pembungkusan Buah	5,320	5,35
7	Pengendalian Hama dan Penyakit	4,960	14,99
8	Pemanenan	14,890	14,99
Jumlah		99,360	100,00

Dari Tabel 3 terlihat bahwa penggunaan tenagakerja yang paling banyak adalah pada kegiatan penyiangan yaitu sebanyak 19,44%. Biaya yang tinggi terjadi akibat penyiangan harus dilakukan setiap sekali tiga bulan. Jumlah tenagakerja pada Tabel 3 tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk lahan 1 Ha. Sedangkan jumlah tenagakerja yang digunakan

untuk lahan 0,5 Ha adalah sebanyak 99,36 HKP (lihat Lampiran 8).

Desinfektan dan Plastik Pembungkus

Untuk menghindari tanaman dan buah pisang tertular oleh penyakit layu fusarium sehingga alat-alat yang digunakan harus steril dan buah pisang harus dibungkus dengan plastic pembungkus.

a. Biaya Desinfektan

Jenis desinfektan yang digunakan adalah *by clean* untuk mencuci peralatan yang digunakan baik pada saat alat akan digunakan maupun setelah alat digunakan, fungsinya supaya alat-alat yang digunakan terhindar dari bakteri-bakteri yang membawa bibit penyakit. Ukuran *by clean* yang dibeli adalah *by clean* isi 500 ml untuk sekali pemeliharaan dalam satu hektar lahan menghabiskan 4 botol, karena pemeliharaan dilakukan sebanyak 4 kali sehingga menghabiskan 16 botol.

b. Plastik Pembungkus

Plastik pembungkus digunakan supaya bibit penyakit yang dibawa oleh angin tidak menular ke buah pisang. Ukuran plastik yang digunakan adalah plastik isi 5 Kg sebanyak 550 buah.

Alat-alat pertanian

Alat yang digunakan oleh pihak FPUA hanya parang, sabit dan gerobak. Untuk itu masing-masing alat dihitung biaya penyusutannya.

Lahan

Luas lahan yang digunakan untuk penelitian adalah 0,5 Ha. Selain membayar sewa kepada masyarakat, FPUA juga harus membayar pajak tanahnya.

Modal

Seluruh modal untuk membiayai seluruh kegiatan usahatani ditanggung oleh FPUA. Untuk menghitung bunga modalnya, dipakai tingkat suku bunga pinjaman usahatani oleh BRI yang berlaku di daerah Kecamatan Baso, yaitu sebesar 12 % per tahun.

Analisa usahatani

Produksi

Produksi tanaman pisang dihitung dalam satuan tandan/0,5 Ha/PP. Untuk lahan satu hektar dapat ditanaman 550 batang pisang. Jumlah yang terserang penyakit, adalah pisang kepok sebanyak 4% atau 12 batang dan pisang tanduk 2% atau 5 batang. Sehingga pisang kepok yang berproduksi tinggal 96% (288 batang) dan pisang tanduk tinggal 98% (245 batang). Pada Tabel 4, terlihat jumlah produksi pisang pada periode panen pertama per 0,5 Ha serta jumlah tanaman pisang kepok dan pisang tanduk yang terserang penyakit.

Penerimaan

Penerimaan merupakan nilai yang diterima petani dari penjualan hasil pisang dalam satuan tandan, dengan harga yang berbeda antara kedua jenis pisang tersebut.

Dalam pemasaran, petani dapat menjual buah pisang di lokasi lahan kepada agen atau distributor yang menjemput langsung ke lahan. Harga jual pisang kepok di lahan petani saat penelitian adalah Rp 30.000/tandan dan pisang tanduk Rp 45.000/tandan. Nilai penerimaan usahatani pisang ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari Tabel 5, dengan total produksi 533 tandan, penerimaan usahatani adalah Rp 19.665.000/0,5 Ha/PP. Penerimaan paling banyak adalah dari pisang tanduk yang harga jualnya lebih tinggi.

Biaya produksi

Biaya produksi dihitung selama periode panen pertama (18 bln).

1. Biaya Bibit

Kedua jenis bibit yang digunakan dibeli dengan harga Rp 6.000/batang. Dalam 0,5 Ha lahan dibutuhkan bibit 550 batang, dengan biaya Rp 3.330.000/0,5 Ha. Biaya

bibit didistribusikan Rp 122.222/ bibit untuk panen pertama adalah bulan selama 27 bulan. Jadi biaya sebesar Rp 2.077.774.

Tabel 4. Produksi Pisang Panen Pertama (per 0,5 Ha)

No	Jenis Pisang	Jumlah Ditanam (batang)	Jumlah Terserang Penyakit (batang)	Jumlah Terserang Penyakit (%)	Produksi (tandan)
1.	Pisang Kepok	300	12	4	288
2.	Pisang Tanduk	250	5	2	245
Jumlah		550	17	6	533

Tabel 5. Penerimaan Panen Pertama (per Ha)

No	Jenis Pisang	Produksi (Rp/0,5Ha)	Harga (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Pisang Kepok	288	30.000	8.640.000
2	Pisang Tanduk	245	45.000	11.025.000
Jumlah		533		19.665.000

2. Biaya Pupuk

Pupuk bagi usahatani pisang ini adalah jenis pupuk organik dan jenis pupuk anorganik. Pada Tabel 6 dapat dilihat jumlah biaya pupuk selama periode panen pertama dalam lahan 0,5 hektar.

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa biaya pupuk adalah Rp 779.590/0,5Ha/PP. Biaya pembelian pupuk anorganik lebih besar dari biaya pembelian pupuk organik, akibat secara teknis penggunaan pupuk organik lebih sedikit dan pupuk anorganik (NPK Mutiara) ternyata mahal (Rp 9000/kg).

3. Biaya Tenaga Kerja

Usahatani pisang sepenuhnya memakai tenagakerja luar keluarga, mulai persiapan lahan sampai pemanenan. Jumlah biaya tenagakerja selama periode panen pertama untuk 0,5 hektar lahan dapat dilihat pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 terlihat bahwa jumlah biaya tenagakerja pada panen pertama per 0,5 Ha adalah Rp 3.477.600; biaya tenagakerja paling banyak adalah pada kegiatan pemeliharaan karena dilakukan sekali 3 bulan (Lampiran 9).

Tabel 6. Biaya Pupuk Periode Panen Pertama (per 0,5 Ha)

No	Jenis Pupuk	Jumlah (Kg/0,5 Ha)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp/0,5 Ha)
1	Pupuk Organik			
	a. Pupuk Kandang	647,50	100	64.750,00
2	b. Titonia Pupuk Anorganik	277,50	416	115.440,00
	-NPK Mutiara	66,60	9.000	599.400,00
Jumlah		991,60		779.590,00

Tabel 7. Biaya Tenaga Kerja Periode Panen Pertama (per 0,5 Ha)

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Pema-kaian (HKP)	Upah (Rp/HKP)	Nilai (Rp)
1.	Persiapan Lahan			
	Pembukaan dan	9,915	35.000	347.025
2.	Pembersihan lahan	1,655	35.000	57.925
3.	Penyiapan bibit			
	Pengolahan tanah	2,475	35.000	86.625
	Pengukuran jarak tanam	9,090	35.000	318.150
4.	Pembuatan lubang tanam	3,305	35.000	115.675
5.	Penanaman			
	Pemupukan	3,470	35.000	121.450
	Pemupukan I	4,960	35.000	173.600
	Pemupukan II			
6.	Pemeliharaan	12,050	35.000	421.750
	Pejarangan	19,320	35.000	676.200
	Penyiangan	6,630	35.000	232.050
	Perempalan			
	Pemeliharaan Buah	1,320	35.000	46.200
	1. Pemotongan	5,320	35.000	186.200
	Jantung	4,960	35.000	173.600
7.	2. Pembungkusan buah	14,890	35.000	521.150
8	Pengendalian hama dan penyakit			
	Pemanenan			
Jumlah		99,360		3.477.600

4. Biaya lain-lain

a. Biaya Plastik Pembungkus

Plastik pembungkus yang digunakan adalah sebanyak 550 buah dengan harga Rp 2.000;/lem-

bar. Jadi besarnya biaya plastik pembungkus adalah sebesar Rp 1.100.000/0,5Ha.

b. Biaya Desinfektan

Desinfektan (by clean) yang digunakan sebanyak 14 botol de-

ngan harga Rp 3.500; per botol. Jadi biaya desinfektan yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp49.000; per 0,5 hektar.

5. Sewa lahan

Lahan yang dipakai untuk usahatani pisang merupakan lahan atau demplot yang disediakan oleh masyarakat dan anggota kelompok tani setempat. Pihak FPUA harus mengeluarkan sewa dan pajak lahan tersebut. Jumlah sewa lahan yang dikeluarkan untuk satu tahun (untuk 2 Ha) adalah sebesar Rp Tabel 8. Biaya Penyusutan Alat Usahatani Periode Panen Pertama

No	Jenis Alat	Jml (unit)	Harga (Rp per satuan)	Umur Ekonomis (th)	Nilai (Rp)	Nilai Sisa (Rp)	Biaya Penyusutan
1	Parang	2	50.000	5	100.000	20.000	14.200
2	Sabit	2	35.000	5	70.000	14.000	9.940
3	Gerobak Sorong	1	200.000	5	200.000	40.000	28.400
					370.000	74.000	52.540

sang pada periode pertama, dimana biaya penyusutan yang dikeluarkan untuk alat parang sebesar Rp 14.200,-/0,5 Ha/PP, sabit Rp 9.940,-/0,5 Ha/PP, dan gerobak sorong Rp 28.400,-/0,5 Ha/PP, dengan total biaya penyusutan Rp 52.540,-/0,5 Ha/PP.

7. Bunga modal

Bunga modal termasuk ke dalam biaya yang diperhitungkan. Bunga modal yang berlaku berdasarkan bunga pinjaman Bank BPD adalah 12% per tahun. Bunga modal yang harus dikeluarkan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 2.711.125;/0,5 Ha selama 17 bulan pada panen pertama.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang dibayarkan meliputi biaya bibit, pupuk, TKLK, biaya angkut,

750.000,-setelah biaya lahan didistribusikan, FPUA mengeluarkan biaya sewa lahan selama periode panen pertama Rp 562.500,-; pajak ditanggung pemilik lahan.

6. Biaya penyusutan alat

Besarnya penyusutan alat parang dan sabit yang digunakan pada usahatani Rp 52.540; untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Dari Tabel 8 terlihat biaya penyusutan peralatan yang dikeluarkan dalam usahatani tanaman pi-

biaya lain-lain. Besar penerimaan dan biaya yang dibayarkan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Pada panen pertama, besar pendapatan yang diperoleh adalah Rp 13.295.836,50/0,5 Ha.

Usahatani pisang menghadapi masalah teknis dan ekonomis. Kedudukan usahatani pisang dianggap sebagai usaha sampingan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan bibit kultur jaringan yang sulit didapatkan menjadi tidak fokus. Padahal potensi keuntungan yang akan diperoleh darinya cukup menjanjikan.

Keuntungan

Keuntungan adalah besar penerimaan dikurangi dengan biaya total—biaya dibayarkan ditambah dengan biaya diperhitungkan. Menurut Soekartawi (1995), suatu usahatani dikatakan berhasil apabila

penerimaan lebih besar dari biaya, dan rugi apabila penerimaan kecil dari biaya. Selanjutnya Bishop dan Toussaint (1986) menyatakan suatu usahatani dikatakan berhasil, bila situasi pendapatannya memenuhi syarat-syarat berikut: 1) cukup untuk membayar semua pembelian sarana produksi, termasuk biaya angkut dan biaya administrasi yang melekat pada pembelian tersebut, 2) cukup untuk membayar bunga modal termasuk sewa tanah, 3) cukup untuk membayar upah tena-

gakerja yang dibayarkan atau bentuk upah tenagakerja luar keluarga. Hasil perhitungan analisa usahatani tanaman pisang pada periode panen pertama untuk lahan satu hektar dapat dilihat pada Tabel 9.

Dari hasil perhitungan diatas (Tabel 9) bahwa penerimaan yang diperoleh usahatani tanaman pisang pada penelitian ini adalah sebesar Rp 19.665.000;/0,5 Ha untuk periode panen pertama dengan pendapatan Rp 13.295.836,50;. Sedangkan total biaya yang dikeluar-

Tabel 9. Hasil Perhitungan Usahatani Pisang Panen Pertama (per 0,5 Ha)

No	Uraian	Nilai (Rp/0,5 Ha/PP)	Alokasi Biaya (%)
A	Penerimaan	19.665.000,00	
B	Biaya Produksi		
	Biaya dibayarkan	6.369.163,50	88,32
	1. Bibit	1.110.000,00	15,18
	2. Pupuk	60.063,50	0,82
	3. TK kerja luar keluarga	3.447.600,00	47,56
	4. Biaya plastik	1.110.000,00	15,18
	5. Biaya By Clean	49.000,00	0,67
	6. Sewa lahan	562.500,00	7,69
	7. Pajak	101.250,00	1,38
C	Biaya diperhitungkan	841.913,50	11,68
	1. Bunga modal	789.373,50	10,79
	2. Biaya penyusutan alat	52.540,00	0,72
D	Total Biaya (B+C)	7.211.007,00	100,00
E	Pendapatan (A-B)	13.295.836,50	
F	Keuntungan (A-D)	12.453.923,00	

kan adalah Rp 7.211.007,00,-/0,5 Ha. Besar biaya yang dibayarkan untuk usahatani Rp 6.369.163,50 (88,32%); dan besar biaya yang diperhitungkan Rp 841.913,50 (11,68%), maka diperoleh pendapatan sebesar Rp 13.295.836,50 dan keuntungan Rp 12.453.923,00. Ini merupakan hasil perhitungan dengan luas 0,5 Ha.

KESIMPULAN

Bibit kultur jaringan yang dipakai dalam usahatani ini adalah bibit pisang tanduk dan pisang kepok. Penelitian yang dilakukan oleh pihak FPUA ini amat terkontrol, baik dari segi kegiatan budidaya yang dilakukan maupun dari pembiayaannya. Dari kegiatan yang terkontrol tersebut jumlah tanaman pisang terserang hama dan penyakit berkurang, dimana pisang yang terserang penyakit masing-masing

pisang kepok 4% dan pisang tanduk 2%. Hasil bisa dikatakan berupa pisang organik, karena menggunakan pupuk organik yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pupuk anorganik. Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani seluruhnya berasal dari tenaga kerja luar keluarga sehingga biaya yang dibayarkan untuk tenaga kerja terlalu besar dan telah mengurangi pendapatan petani.

Penerimaan usahatani ini adalah sebesar Rp 19.665.000;/0,5 Ha/PP. Biaya yang dibayarkan dan diperhitungkan untuk usahatani masing-masing adalah sebesar Rp 6.369.163,50/0,5 Ha/PP dan sebesar Rp 841.913,50/0,5 Ha/PP sehingga total biayanya berjumlah Rp 7.211.007,-. Sedangkan pendapatan Rp 13.295.836,50/0,5 Ha/PP, dan keuntungan Rp 12.453.923/0,5Ha/PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia*.
- Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2003. *Perkembangan tanaman pisang tahun 2003 di Sumatera Barat*. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. Padang.
- Statistik Tanaman Pangan Dan Hortikultura. 2007. *Perkembangan tanaman pisang tahun 2007 di Sumatera Barat*. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Agam Dalam Angka*. Bappenas. 2000. *Prospek Pengembangan Pisang*. <http://www.bappenas/prospek-pengembangan-pisang/go.id>.
- Balai Penelitian Tanaman Buah-Buahan. 1996. *Komoditas Pisang*. Balai Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Solok.
- Daniel Moehar. 2002. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2004. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis*.
- Departemen Pertanian. 2007. *Prospek dan Peluang Tanaman Pisang*. <http://www.agribisnis.deptan.go.id>.
- Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2000. *Pisang*. <http://www.ristek.go.id>.
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2006. *Laporan Tahunan 2006*. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. Padang.
- Hadisapoetro. 1973. *Biaya Dan Pendapatan Dalam Usahatani*. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Lakitan, Benyamin. 1995. *Hortikultura (Teori, Budidaya, dan Pasca Panen)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nazir Moh. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rukmana, R. 1999. *Usahatani Pisang*. Kanisius. Yogyakarta.
- Semangun, H. 1989. *Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia*. UGM University Press. Yogyakarta.
- Subanar, Harimurti. 1994. *Manajemen Usaha Kecil*. BPFE. Yogyakarta.
- Sunarjono et all. 2000. *Produksi Pisang di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Holtikultura. Jakarta.
- Suyanti, S dan Ahmad, S. 1994. *Budidaya Pisang, Pengolahan dan Prospek Pasar*. Penebar Swadaya. Jakarta.

PERSPEKTIF BUDAYA DAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN RAKYAT

Fuad Madarisa

Abstract. *Cultural and institutional perspectives play an important role in establishing agribusiness characters within techno-parks' regional development model. First, they reflect values, norms and institutional configuration to support regional development. Second, their level of advances ensured the 'trust, correctness, and capabilities' of cultural and institutional establishment as genuine tools of market and regional economics development. The paper offers several critical examples of cultural and institutional foundations in searching for their current positions. It includes the role of each stakeholder involving in the region and its style within the period of time. Then, it also shows tactics of improving institutional performance as well as the indicators of monitoring institutional development.*

Kata Kunci: perspektif budaya dan institusi, kawasan agribisnis, peran pihak terkait, dan kinerja lembaga

PENDAHULUAN

Transformasi (perubahan total dari aspek sosial) menuju agribisnis muncul dari penerapan gagasan cerdas. Intinya berupa teknologi dan cara-cara mendorong produktifitas serta efisiensi pemakaian sumberdaya bersamaan dengan prosesnya. Masyarakat tani ternak karena itu, meniru, menerima, mengelola, dan melembagakannya kedalam bu(di)daya. Jadi, pembaharu perlu mencermati budaya dan institusi yang mendorong atau sebaliknya jadi kendala pengembangan agribisnis. Maka transformasi masyarakat mulai dari peasant menjadi usaha berwatak agribisnis, dengan mementingkan adanya peran moral yang (mestinya) merujuk aspek transendental.

Perhatian pada budaya petani peternak berupa keseluruhan cara dan seluk beluk kehidupan mereka sering kali dipandang usang. Bila terjadi kebuntuan alih-alih mandiri dalam menyelesaikannya para pengambil kebijakan di negara berkembang minta pertimbangan dan

bantuan dari negara maju. Maka, perspektif budaya dan institusi amat perlu untuk memahami pemaknaan realitas yang kesannya meremehkan itu. Sebab banyak negara berkembang, seperti Indonesia, telah lama memaklumkan 'merdeka'.

Apalagi belakangan ini muncul dinamika kebijakan pertanian dan pangan yang melibatkan tiga karakter pelaku yang saling berbeda; yaitu (pemerintah, swasta dan masyarakat). Simak misalnya UU 16/2006. Padahal masyarakat tani ternak membutuhkan peran sinkron dan saling menghantar satu sama lainnya. Sebuah sinergi dinamis saling menguntungkan dan berujung pada keadilan dan kesejahteraan.

Malahan, Vorley (2002) telah mengidentifikasi kebijakan yang justru cenderung menuju kearah pelemahan, seperti:

a. Menyusutnya peran yang diikuti dengan berkurangnya harapan pada adanya intervensi negara;

- b. Persetujuan perdagangan multilateral, termasuk terhadap komoditi pertanian yang membuka ruang persaingan lebih luas dan ketat;
- c. Desentralisasi dan otonomi lingkup pengambilan kebijakan negara;
- d. Bangkitnya pemikiran dualisme yang bertentangan dan berkurangnya harapan kepada pertanian sebagai pendorong pembangunan pedesaan;
- e. Pasar bebas yang menurunkan bea masuk pada komoditi luar negeri dan membuat harga lebih kompetitif;
- f. Pemberian ranah penelitian dan penyuluhan pada pihak swasta dan masyarakat;
- g. Masifnya teknologi baru yang kian kompleks, rumit dan celakanya kebijakan seputar (bio)teknologi cenderung membingungkan;
- h. Bangkitnya organisasi sosial ekonomi baru yang mendorong kompetisi lebih ketat.

Karena itu, kemajuan agribisnis yang cenderung lebih memakai pendekatan pasar dan berkarakter industri, kiranya tidak serta merta meremehkan solidaritas sosial. Lagi pula transformasi, seperti globalisasi, standarisasi dan nilai tambah usaha, yang tengah memerangkap kehidupan petani peternak, membutuhkan solusi kritis dan kreatif. Bila tidak campin menyikapinya, mereka yang memang bertempur diarena pasar bebas, bakal keteteran dan tergelepar.

Tulisan berikut ini merupakan penyarian dari buku penulis yang judulnya perspektif sosiologi pembangunan agribisnis (Fakultas Peternakan Unand tahun 2010). Isinya bisa menyumbang bagi pemahaman tentang budaya dan institusi buat pengembangan kawasan peternakan rakyat berwatak agribisnis. Lalu, informasikan sesuatu agar kita bisa melakukan proses antisipatif. Bagian (1) kawasan pengembangan peternakan rakyat, (2) perspektif agribisnis, (3) budaya dan

institusi penunjang pengembangan kawasan peternakan rakyat.

KAWASAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN RAKYAT

Bappenas (2004) telah mengeluarkan tatacara pengembangan kawasan dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tentu, sesudah penerapan kebijakan desentralisasi pemerintahan di daerah. Pengertian kawasan peternakan rakyat adalah; suatu kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha peternakan. Dalam pengembangannya melibatkan partisipasi rakyat. Bentuk-bentuknya ialah penumbuhan investasi, proses pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan mereka. Ia dipandang lebih sebagai pendekatan agribisnis ketimbang kawasan peternakan biasa. Sebab kawasan ini membawa semua aspek *on-farm dan off-farm* ke dalam pertimbangan kegiatannya. Ciri-ciri kawasan peternakan rakyat meliputi hal berikut, seperti:

- a. Lokasi sesuai dengan agroekosistem dan alokasi tata ruang daerah;
- b. Peran masyarakat sekitar kawasan amat menentukan sebagai pelaku bisnis;
- c. Ternak unggul merupakan basis atau dasar pengembangan yang strategis;
- d. Adanya upaya pengembangan kelompok peternak menjadi pelaku bisnis;
- e. Bagian terbesar komponen pendapatan masyarakat berasal dari agribisnis peternakan;
- f. Mempunyai prospek pasar yang jelas dengan dukungan teknologi memadai;
- g. Memiliki prospek dan peluang pengembangan dan diversifikasi usaha yang tinggi;
- h. Mendapat dukungan institusi dan jejaring kerja kelembagaan dari hulu sampai hilir.

Secara teknis kawasan peternakan ini memadai dari sisi penyediaan air,

sarana pengangkutan, komunikasi, jarak dengan pasar, iklim, dan keamanan dari pemukiman penduduk. Kawasan ini memiliki sarana dan prasarana seperti; industri bibit, pakan, perlengkapan obat dan vaksin, peralatan dan mesin mesin. Lagi pula ia punya fasilitas pasca panen seperti rumah potong hewan dan pengolahan hasil lainnya. Kemudian secara administrasi juga mendukung.

Institusi peternak memainkan peran penting, sehingga kelompok peternak dan asosiasi bisa bekerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama ini meliputi tim teknis khusus yang mendiskusikan berbagai persoalan kawasan. Ia melibatkan pula kerjasama sinergis dengan lembaga keuangan, pihak swasta terkait, dan BUMN serta koperasi. Pada gilirannya kelompok peternak menjelma menjadi KUBA sebagai ajang inovasi kerjasama institusi. Dengan demikian agribisnis merupakan esensi pembangunan kawasan peternakan rakyat. Apa itu budaya dan institusi dalam perspektif pembangunan agribisnis?

PERSPEKTIF AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN

Agribisnis di Indonesia telah menjadi kebijakan sejak satu dekade terakhir. Di Sumbar, agribisnis terbalut dalam kebijakan 'mendorong terbinanya *techno-park* berbasis pertanian, sebagai perwujudan aktivitas ekonomi yang bersandar pada ilmu pengetahuan'. Simak misalnya, misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025, pada Perda No 7/2008, yang berbunyi "meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan berdaya saing tinggi". Sampai akhir priode kedua RPJM tahun 2015, telah terbina 36 kawasan agribisnis. Lantas seperti apa kategori dan komponen transformasi menuju agribisnis itu? Perhatikan Tabel 1.

Menerapkan misi ini jelas merujuk pada kegiatan ekonomi potensial dan telah menunjukkan produktifitas kerjanya yang baik. Ukuran menentukan potensi atau kinerja baik, di antaranya adalah; pengalaman (budaya mengelola) dan kehadiran fasilitas pendukung serta sinerginya dengan peran (institusi) para pihak terkait didaerah. Jadi, sesuai dengan pendapat Davis (2004), perspektif budaya dan institusi berupa analisa sosial, partisipasi, dan berpihak pada kelompok rentan dan pinggiran, sangat penting dalam semua pembangunan (termasuk agribisnis). Bagaimana budaya dan institusi yang relevan dengan pengembangan kawasan agribisnis peternakan rakyat itu?

BUDAYA DAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN RAKYAT

Giddens (1991) mengungkapkan bahwa budaya ialah keseluruhan dari cara kehidupan penduduk, termasuk pola berfikir dan berperilaku, dan menghasilkan lingkungan sosial yang terbina oleh interaksi manusia. (Ingat ada pula lingkungan alam) sebagai ciptaan Tuhan. "*Budaya terdiri dari nilai nilai dari anggota suatu kelompok yang mereka anut, norma yang mereka ikuti, dan barang materil yang mereka ciptakan. Nilai nilai adalah keharusan abstrak, sementara norma ialah prinsip prinsip jelas atau aturan yang diharapkan terlaksana dan dapat dicermati. Norma mewakili 'keharusan' dan 'tidak boleh' dalam kehidupan sosial masyarakat*" (hal. 31).

Institusi ialah mekanisme atau cara masyarakat memenuhi kebutuhannya – yang berlangsung lama dan telah menyatu dengan struktur sosial. Contoh institusi sosial adalah badan pemerintahan, sistem sekolah dan sistem sosial keagamaan. Institusi melibatkan norma dan nilai dimana sebagian besar

Tabel 1. Kategori dan Komponen Transformasi Agribisnis

No	Kategori	Tipe Komponen	
		Lama /Peasant	Maju/Agribisnis
1	2	3	4
1	Sistem	Subsisten + dekat dengan keperluan sendiri	Komersil
		Banyak jenis hasilnya	Hasilnya tunggal
		Bebas tidak dijaga	Terlindungi
		Menghindari resiko /apatis	Mengambil resiko
		Tradisionil	Agresif
		Masukan dan keluaran rendah	Masukan dan keluaran tinggi
2	Lahan	Berbasis pada hak guna usaha	Hak milik atau sewa
		Tidak disurvei	Disurvei
		Pemilikan lahan oleh suku atau negara	Pemilikan lahan yang aman
		Sisa atau tidak subur	Subur
		Secara struktur kerap kekurangan	Tersedia khusus buat perusahaan
3	Tenaga kerja	Intensif	Ekstensif
		Tidak memakai mesin	Pemakaian mesin tinggi
		Kemampuan diperoleh informal	Melalui pelatihan formal
		Berasal dari keluarga sendiri	Tidak dari keluarga saja
4	Bibit tanaman dan ternak	Jenis bibit dari ladang sendiri	Varitas yang hasil dan responnya tinggi
		Campuran	Hibrida
		Disiapkan sendiri	Beli tiap tahun/ketika perlu
		Tidak ada perlakuan khusus	Ada penutup bibit
5	Air	Tergantung musim, tidak aman	Aman, beririgasi dan berpotensi tinggi
6	Kredit	Tidak ada, kecuali informal	Tersedia beragam jenis kredit
7	Layanan penyuluhan	Jarang, hanya dari pemerintah	Penyuluhan pribadi dan pemerintah
8	Pasar	Kelebihan produksi dijual ke pasar lokal/daerah sendiri	Hasil memang untuk dijual semuanya
		Penjualan setelah panen	Strategi pemasaran terkendali
		Tidak ada nilai tambah	Adanya pengendalian kualitas

Sumber : Diolah dari Annexes 11 dan Osorio (2007).

anggota mematuhi. Sanksi yang berat melindungi semua mode pelem-bagaan perilaku anggota. Dengan begitu, budaya dan institusi ibarat dua muka mata uang logam saling terkait satu sama lain dalam lingkup norma, nilai, aturan, perilaku untuk menghasilkan barang dan jasa pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Budaya utama yang terkait dengan agribisnis adalah terbinanya watak dan karakter industri dalam aktivitas penyelenggaraan peternakan. Baik dalam konteks *on-farm* atau *off-farm*, seperti bibit, pakan, pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemasaran. Kemudian, institusi atau kelembagaan, permodalan, informasi, teknologi dan sumberdaya manusia. Sedikitnya ada budaya jujur, dipercaya dan disiplin yang mesti ada. Simak dua contoh berikut:

a. Agama, pasar dan masyarakat madani, dari Stackhouse dan Lawrence Stratton (2002), disebutkan bahwa sistem pasar terbuka, adil dan sukses tidaklah disandarkan pada ego, korupsi, kibul dan kebohongan. Ia tidak juga bakal berhasil tanpa struktur moral dan keterbukaan sosial. Sistem pasar hanya bisa terbuka dan adil manakala ada sistem kelembagaan yang berkelanjutan dan ditunjang dengan kejujuran sosial.

Ketika institusi berkarakter semacam ini terwujud, maka suatu sistem pasar bebas tidak hanya bisa mekar, ia malah menyumbang secara optimal buat pembangunan lebih lanjut. Tentu dengan watak adanya pemerataan akses pada informasi, pemerintahan yang baik, hak azasi manusia, dan kepedulian sosial. Kemudian ia membentuk dan seterusnya mempertahankan institusi yang bermanfaat dalam memberikan kualitas pelayanan barang dan jasa dengan harga yang fair. Malahan ia bisa menguat-

kan kekeluargaan, kreatifitas budaya dan institusi agama.

Secara bersamaan semua faktor ini menyumbang bagi apa yang disebut dengan 'modal sosial' atau modal budaya dalam teori sosial dan politik. Dengan kata lain, mereka menghasilkan modal ekonomi yang berproses dan bekerja buat kebaikan semua. Perbedaan menyolok antara masyarakat miskin dan dinamis ialah, ketika sumber kesejahteraan baru tumbuh dan ranah pengembangan kapasitas manusia berada ditengahnya. Sehingga bisa dimengerti bahwa aspek moral mesti masuk dalam perhitungan.

Agar mengerti bagaimana pasar bekerja ditengah masyarakat madani, perlu menyajikan perspektif sejarah kehidupan ekonomi. Maka, perlakuan pada wacana ini mesti memasukkan 'agama' sebagai hal yang amat berpengaruh kepada moral, masyarakat dan budaya. Sebab ia membatasi atau membuka konteks sosial pasar yang mempengaruhi kenyataan kesejahteraan atau kemiskinan. Memang ada ranah tidak nyaman, ketika realitanya agama membatasi dorongan pada mekarnya pasar. Apalagi tidak semua orang suka dicermati sesuai agama dan kepercayaannya. Tapi tidaklah jujur, ketika meremehkan etika agama bersilang arah dalam membentuk orientasi ekonomi;

b. Hikmah sejarah gempa bumi. Selain alasan ilmiah, sejumlah ayat mengisahkan guncangan bumi dan reruntuhan bangunan terjadi lantaran gempa. Namun penyebabnya bukan benturan dan pergesekan patahan bumi saja. Dalihnya justru lebih mengacu kepada tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan mendustakan agama. Simak, misalnya umat nabi Syuaib di Madyan.

"Kepada penduduk Madyan, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Ia. Telah datang kepadamu bukti yang nyata daripadaNya. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu kurangkan barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan kamu membuat kerusakan di permukaan bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Itu lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." (Q 7:85). ...Lalu gempa bumi menimpa mereka. Dan pagi hari mereka mati bergelimpangan dalam negerinya, mencium tanah (Q 7:91).

Apakah salah satu penyebab gempa, karena itu, adalah perilaku 'tidak menyempurnakan takaran dan timbangan'? Kalau betul pelajaran sejarah bahwa gempa terkait dengan transaksi jual beli, maka apa kebijakan guna mengantisipasi terjadinya gempa bumi? Bukankah perlu melakukan tera timbangan dan 'reward and punishment' dalam memastikan jituannya ukuran takaran dan timbangan? Transaksi dan perilaku agribisnis, dengan begitu, mesti memiliki landasan kejujuran, seperti saat menakar dan menimbang bukan ?.

Institusi yang berhubungan dengan pengembangan kawasan peternakan meliputi tiga karakter. Hal serupa terjadi pada penyuluhan agribisnis. UU 16/2006 mengukuhkan tiga institusi yang berbeda sifat sebagai pelaku, dalam kawasan, yaitu; pemerintah (yang sudah otonom), kelompok peternak dan pihak swasta. Kendati ketiganya mempunyai perilaku yang berlainan satu sama lain, yang kita perlu ialah sinergi mereka. Simak Tabel 2.

Ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri dalam upaya mengembangkan kawasan peternakan. Tetapi, kita tidak bisa meremehkan satu lembaga, sebab ketiganya mesti bekerja secara sistematis dan sinkron untuk kepentingan kawasan secara utuh dan menyeluruh.

Selain itu, ketiga karakter institusi bersinergi dalam peran-peran yang mereka mainkan. Bersama perjalanan waktu, peran pemerintah cenderung turun, walaupun tidak bakal habis. Sebaliknya peran swasta dan masyarakat kian meningkat. Simak Model 1.

Pengembangan kawasan peternakan mulai dengan Tahap 1, belajar secara efektif. Disini peran pemerintah masih besar mendorong dinamika kawasan.

Pemerintah membentuk tim sinergi yang melibatkan semua pihak terkait. Ukurannya adalah kompetensi dalam arti luas untuk mewujudkan kawasan dinamis dan mendapat komitmen pimpinan yang kuat.

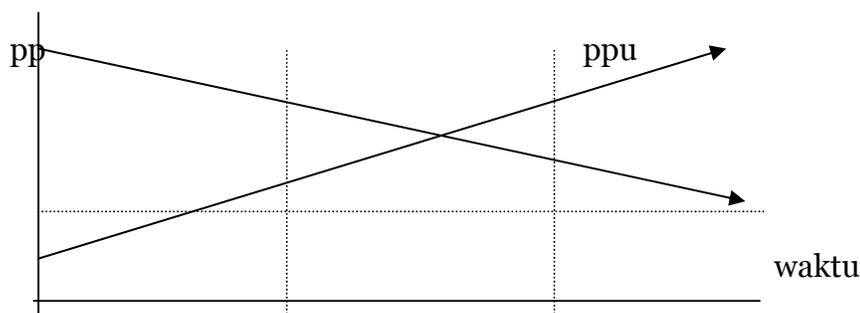
Tahap kedua, belajar efisien adalah melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dimana peran peternak dan swasta semakin membesar. Sebaliknya peran pemerintah mulai berkurang. Hal ini mungkin terjadi lantaran pada tahap pertama para pihak terkait telah meraih pengalaman menerapkan pengembangan kawasan.

Tahap terakhir, perluasan kawasan pengembangan, dimana peran pemerintah berada pada tingkat pelayanan minimal. Sedang peternak dan swasta tinggi perannya. Maka, untuk mencermati posisi institusi peternak dalam perannya terhadap pengembangan kawasan agribisnis peternakan, perhatikan Tabel 3. Sedangkan strategi memperbaiki kinerja institusi, perhatikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Sifat dan potensi sinergi institusi terkait pengembangan kawasan peternakan

No	Unsur sifat	Pemerintah	Swasta	Kelompok masyarakat
1	Prinsip/me kanisme kerja	Organisasi, birokrasi	Proses pasar	Asosiasi, kesadaran
2	Pengambil keputusan	Ahli, administrator	Individu, produsen, konsumen, investor dan penyimpan	Pimpinan dan anggota
3	Tuntunan perilaku	Peraturan-peraturan	Sinyal harga, kualitas layanan dan penyesuaian	Persetujuan
4	Kriteria keputusan	Kebijakan dan alat penerapannya	Efisiensi maksimal, keuntungan & kegunaan	Kepentingan anggota
5	Sanksi	Kekuasaan negara, paksaan	Kehilangan uang	Tekanan sosial
6	Model kerja	Atas- bawah	Perorangan	Bawah – atas

Sumber : Helmi et.al (2000).



1. Belajar efektif 2. Belajar efisien 3. Perluasan
 PP = peran pemerintah PPU = peran swasta dan masyarakat

Model 1. Perubahan Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Menurut Rowe dan Neville Commins (2008) ada asumsi dan keadaan untuk mendorong dinamika kawasan agribisnis berbasis usaha peternakan kecil dengan kasus bioteknologi, sebagai berikut:

1. Ekonomi telah berkembang secara luas, beragam dan sistemik serta berkelanjutan;
2. Adanya dasar dasar penelitian aplikasi yang kuat;
3. Budaya kewirausahaan yang mantap;

4. Pelaku dan pihak terkait yang aktif, termasuk lembaga penelitian perguruan tinggi sebagai penarik pengembangan kawasan;
5. Pengelolaan yang berwatak proaktif dan kewirausahaan;
6. Dukungan kuat, konsisten dari kebijakan terhadap pengadaan infrastruktur, pengembangan usaha, dana untuk pengadaan tampang dan modal ventura.

Tabel 3. Kriteria menilai perkembangan kelompok peternak dalam kawasan

No	Kriteria	Indikator/ tolok ukur
1	Terdapat kelompok yang kuat dan tangguh	<ol style="list-style-type: none"> 1. karakter / sifat kelompok jelas bagi semua anggota 2. peran dan tanggungjawab terbagi secara merata / adil 3. aturan dan regulasi berjalan baik 4. anggota mau mengikuti aturan baru 5. tersedia cukup personil sebagai calon anggota inti 6. anggota inti mengerti peran dan fungsi mereka 7. pimpinan dipilih dalam rapat dan pertemuan
2	Anggota saling bertemu dan berkomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. kelompok menyelenggarakan pertemuan terjadwal 2. semua anggota mengikuti pertemuan 3. semua anggota berperan dalam diskusi 4. keputusan selalu di patuhi 5. tersedia hasil hasil pertemuan secara tertulis 6. selalu membuat publikasi tentang kegiatan dan kemajuan kelompok
3	Pengelolaan keuangan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. neraca dipelihara atas dasar kebiasaan kelompok 2. bendahara memberikan laporan rutin 3. catatan pembukuan sangat dapat dipercaya 4. sistem audit berjalan atau berfungsi
4	Kegiatan kelompok berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan mampu menyahuti kebutuhan dan menyelesaikan masalah anggota 2. kegiatan bisa berjalan memakai sumberdaya sendiri 3. kelompok memutuskan kegiatan yang bakal dikerjakan
5	Pemecahan masalah berjalan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. semua konflik priode terakhir tersalurkan 2. ada kesepakatan prosedur pemecahan konflik
6	Kaitan pada pihak luar terbangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. keterkaitan secara horizontal (sesama kelompok) telah terbangun 2. kelompok memperoleh manfaat dari hubungan sesama kelompok sejenis 3. kaitan vertikal (pemerintah & swasta) terbangun 4. kelompok menerima manfaat dari hubungan vertikal
7	Mobilisasi sumber daya efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. asset kelompok meningkat 2. kelompok menerima masukan dan rezeki baru 3. kelompok menggalang dana 4. kelompok menggunakan dana untuk menambah asset

Sumber: Tidarat (1998).

Semua kondisi lapangan ini diukur dengan kriteria kinerja sebagai berikut:

a. Adanya akses kepada lembaga penelitian yang mapan dan proses pengem-

bangun sumberdaya manusia sesuai kebutuhan;

b. Adanya pasar dan kemampuan memasarkan produk dan layanan berkualitas tinggi;

- c. Adanya kemampuan pemasaran dan pengelolaan bagi usaha (kecil dan menengah) yang langka kapasitasnya dalam hal seperti itu;
- d. Berada ditengah masyarakat yang jujur, melindungi produk dan rahasia proses, melalui keamanan, hak paten dan cara cara lainnya;
- e. Mampu memilih atau menolak jenis usaha mana yang bisa memasuki kawasan. Rencana usaha disesuaikan dengan identitas kawasan;
- f. Mempunyai identitas yang jelas, yang kerap dinyatakan dengan logo, lambang/symbol atau pola manajemen;
- g. Pengelolaan yang sehat dari sisi keuangan dan memperlihatkan rencana pengembangan jangka panjang;
- h. Didukung oleh pelaku ekonomi yang kuat, dinamis dan stabil; dari lembaga keuangan, politik atau universitas;
- i. Pengelola yang aktif dan punya visi; mampu membuat keputusan jitu dan terarah; terapresiasi secara akademik, pelaku usaha dan mewakili kawasan sebagai 'watak kawasan itu sendiri';
- j. Kawasan mendapat sokongan dari lembaga konsultan, pelayan teknis dan labor serta institusi penjaga kualitas hasil dan proses.

Tabel 4. Taktik perbaikan kinerja institusi dan kelompok

No	Kriteria	Proses
1	Keputusan	Arah baru dikeluarkan oleh pimpinan dan dilewatkan melalui hirarki kelompok dengan cara satu arah
2	Penggantian	Satu atau lebih personil – biasanya pada posisi tinggi – diganti dengan orang yang berbeda pandangan, afiliasi, kemampuan dan sikapnya
3	Restrukturisasi	Struktur program dimodifikasi bersamaan dengan perubahan kewenangan dan pelaporan, interaksi staf lapangan, kaitan dengan pelanggan dst
4	Keputusan kelompok	Anggota kelompok berpartisipasi memilih dan melaksanakan pilihan perubahan yang disarankan pihak lain baik dari pihak luar atau pimpinan
5	Pengumpulan data & diskusi	Pihak luar mengumpulkan informasi tentang program dan memberikan umpan balik kepada staf. Staf menganalisa informasi, diagnosa masalah, dan mengembangkan solusi
6	Pemecahan masalah kelompok	Satu kelompok terkait program mengumpulkan informasi, identifikasi dan analisa isu dan masalah serta merancang dan menerapkan pemecahannya
7	Kelompok T	Fasilitator membantu kelompok memahami proses perilaku individu dan kelompok untuk mengembangkan hubungan interpersonal
8	Ujicoba	Ujicoba dipakai menentukan, pilihan mana yang berjalan baik bagi kinerja kegiatan. Belajar dari pengalaman ujicoba dimasukan dalam perubahan berikutnya
9	Pelatihan	Program bagi peserta untuk mendapat tambahan keterampilan, kemampuan, konsep dan perilaku baru

Sumber: Brinkerhoff (1990).

PENUTUP

Budaya dan institusi memainkan peran penting untuk mendorong dinamika kawasan agribisnis peternakan rakyat. Setidaknya kejujuran, kepercayaan dan disiplin. Ia melibatkan tiga karakter lembaga yang berbeda; pemerintah, swasta dan masyarakat peternak. Peran pemerintah cenderung menurun bersamaan perjalanan waktu. Dilain pihak peran kelompok masyarakat dan swasta semakin besar.

Ada tujuh kriteria guna menilai tingkat perkembangan kelompok, yaitu; adanya kelompok yang kuat, komunikasi yang baik, keuangan terbuka, kegiatan yang berjalan, penyelesaian masalah efektif, ada kerjasama dengan pihak luar, dan efektifnya mobilisasi sumberdaya.

Ada sembilan kiat untuk memperbaiki kapasitas institusi penunjang kawasan agribisnis peternakan rakyat, seperti; keputusan, penggantian, keputusan bersama, restrukturisasi, diskusi dan pengumpulan data, penyelesaian masalah kelompok, hubungan personal, uji coba dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Sumbar 2009. *“Grand Design the International Training Centre and Livestock Development.”* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas, 2004. *“Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Percepatan Pembangunan Daerah.”* Dirkem Khusus-Tertinggal Bappenas. Jakarta.
- Brinkerhoff, D.W. (1990). *Improving Development Program Performance. Guidelines for Managers.* Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Davis, Gloria. 2004. “A History of the Social Development Network in The World Bank, 1973–2002.” *Paper* No. 56/March 2004. The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Fax: 202-522-3247
- Giddens, Anthony. 1991. *Sociology.* Cambridge: Polity Press.
- Helmi, Fuad Madarisa, Nuwirman dan S Fairuzi, 2000. “Pola Pengembangan Komoditi Usaha Ekonomi Rakyat Sumatera Barat.” Bappeda Sumbar dan PPs Universitas Andalas Padang
- Jassin, H.B, 1982. *Terjemahan Al Quran Bacaan Mulia.* Jakarta: Yayasan 23 Jan 1942.
- Madarisa, Fuad. 2008. “Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; Strategi dan Proses Belajar Bersama Kelompok.” Fak. Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Madarisa, Fuad. 2010. “Perspektif Sosiologi Pembangunan Agribisnis.” Fak. Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Osorio, Jose Diaz. 2007. “Family Farm Agriculture Factors Limiting its Competitivity and Policy Suggestions.” *Report* prepared for the OECD review of agricultural policy in Chile. Department of Agricultural Economics University of Talca Chile June, 22nd 2007.
- Rowe, David dan Neville Commins. 2008. “Success Factors for Science Parks in the Developed World and Emerging Economies.” *The proceedings of the IASP Conference, 2008, Johannesburg, South Africa.*
- Stackhouse, Max dan Lawrence M. Stratton, 2002. *Capitalism, Civil Society, Religion, and the Poor: A Bibliographical Essay.* Delaware: Intercollegiate Institute Wilmington.
- Tiyajamorn, Tidarat, 1998. “How Farmers can Help Strengthen Government Extension Services: Experience in Thailand.” *Paper* presented at Ateneo Manila Alumni Conference, Manila.
- Vorley, Bill. 2002. “Sustaining Agriculture: Policy, Governance, and the Future of Family-based Farming.” *A Synthesis Report* of the collaborative research project ‘policies that work for sustainable agriculture and regenerating rural livelihoods. London WC1H 0DD, UK: IIED — bookshop@iied.org



PERSPEKTIF PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJATAN PETANI

Hery Bachrizal Tanjung

Abstract: *Agricultural extension in Indonesia has been coopted by the national interest to increase food production, or specifically to achieve self-sufficiency in rice. This situation has brought about the farmers' society dependent and ignorant, losing their sovereignty. The paper offers a perspective of agricultural extension in order to empower the farmers. As the nature of extension is to promote society's potential and competency, its practices should have not been top-down, linear, and instructive.*

Key word: *penyuluhan, petani, pertanian, pembangunan, masyarakat*

DEHUMANISASI PETANI SEBAGAI MASALAH PENYULUHAN PERTANIAN

Penyuluhan pertanian Indonesia sebagai pemegang mandat dan pelaksana pendidikan pertanian di tingkat petani (Abbas, 1995; Slamet, 1995; dlsb), sedang menghadapi tantangan berat dewasa ini. Tantangan tersebut tercermin dari pernyataan dua pakar penyuluhan pembangunan Indonesia, berikut: "Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984 melalui program Bimbingan Massa¹] justru membawa ma-

lapetaka bagi penyuluhan pertanian, karena secara tidak disadari banyak orang yang mempersepsikan bahwa penyuluhan pertanian itu adalah juga alat untuk meningkatkan produksi pertanian (sebagai salah satu komponen Bimas), seperti halnya pupuk dan insektisida; dan bukan sebagai usaha tersendiri yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani" (Slamet, 2001).

"Penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dan tidak menghasilkan perubahan esensial, yaitu petani yang rasional dan mandiri, tetapi justru menjadikan petani yang selalu tergantung kepada dan digantung oleh pemerintah" (Padmanagara, 1995).

Soebiyanto (1998), Sumardjo (1999), dan Puspadi (2001) di dalam disertasinya masing-masing, mem-

¹ Bimbingan Massal (Bimas) adalah program pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pencapaian swasembada pangan (khususnya beras) melalui peningkatan produktivitas pertanian padi, dengan aplikasi paket input produksi: benih unggul hasil pemuliaan, pupuk buatan untuk meningkatkan unsur hara lahan, pestisida dan insektisida untuk mencegah hama dan penyakit tanaman, irigasi yang cukup, bimbingan dan penyuluhan, kredit usahatani, dan intervensi pemerintah. Bimas yang dimulai tahun 1966 merupakan kelanjutan lebih terkonsolidasi dari proyek

Demonstrasi Massal penerapan Panca Usahatani setelah ditemukannya benih unggul padi oleh IPB tahun 1963 (Abbas, 1995).

perjelas tantangan berat penyuluhan pertanian, dengan melukiskan kinerja kelembagaan penyuluhan pertanian mutakhir yang telah kritis dan stagnan untuk menggerakkan kegiatan transfer teknologi produksi kepada petani guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian selama ini. Bahkan diperlukan paradigma baru jika ingin mengarahkan program penyuluhan pertanian kepada yang bersifat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan menuju kemandirian petani.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan, penyuluhan pertanian telah terjebak menjadi bagian dari program peningkatan produksi pertanian nasional melalui Bimas. Penyuluhan pertanian yang lebih berorientasi peningkatan produksi, menurut pandangan Wahono (1994); Fakhri (1996; 1999); Reijntjes, Haverkort dan Waters-Bayer (1999); dan Mubyarto (1999), memang berhasil mendorong terjadinya proses adopsi secara intensif dan ekstensif oleh petani terhadap input-input pertanian hasil teknologi biologi (benih unggul) dan teknologi kimiawi (pupuk buatan, pestisida dan insektisida). Tetapi proses adopsi tersebut justru menyebabkan robohnya kelembagaan dan budaya pertanian lokal (yang telah tumbuh-kembang berabad-abad sebelumnya), dan sekaligus menjadi mesin penggerak keuntungan besar dari perusahaan kapitalis global produsen input-input pertanian tersebut. Sebagai contoh, hilangnya kontrol dan kepemilikan petani atas plasma nutfah benih padi asli-lokal pedesaan (yang beralih ke perusahaan global produsen

benih unggul), karena petani meninggalkan pemakaian benih padi asli-lokal dan mengadopsi benih unggul secara intensif.² Dengan kata lain penyuluhan pertanian ikut di dalam proses menuju *dehumanisasi petani* secara pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik; serta tidak memiliki model kelembagaan yang memberikan apresiasi terhadap hak-hak petani untuk menjadi *petani sejati*³, yaitu petani yang berdaya secara sosial-ekonomi dan berwawasan kelestarian ekologis.

Berbagai upaya menuntut dan memperkuat hak-hak petani muncul di banyak tempat. Misalnya, bersamaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia FAO di Roma pada November 1996, dilaksanakan forum koalisi masyarakat

² Beberapa tahun sebelum TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terjadi penjarahan benih unggul asli-lokal tanaman pangan, terutama padi, (atas nama penelitian untuk menghasilkan benih unggul dalam rangka revolusi hijau) di seluruh dunia (benih asli-lokal dinyatakan tidak unggul dengan tingkat produktivitas rendah). Benih padi asli-lokal Indonesia yang dinyatakan sudah punah di tataran pedesaan, namun ternyata setidaknya ada 257 jenis benih yang tersimpan di IRRI milik USA (Valve, 1998 dalam Wahono, 1999).

³ **Petani sejati** adalah petani lelaki dan perempuan yang hidup dalam relasi sosial yang adil dan tanpa dehumanisasi dengan hak-hak yang dimilikinya; yaitu hak yang berkaitan dengan proses memelihara, memperbaiki, dan menyediakan keanekaragaman sumberdaya genetik tanaman; juga memperoleh keadilan harga, informasi produksi dan pasar yang benar, bertani berkelanjutan secara ekologis, dan hak atas tanah (FAO, dalam Fakhri, 1999). Maka petani sejati adalah petani yang berdaya secara sosial-ekonomi dan berwawasan kelestarian ekologi.

sipil dunia yang peduli pertanian dan pangan untuk memperjuangkan aspirasi petani dalam Konferensi Pangan tersebut (Wiryo, 1996). Aspirasi petani adalah : (a) memperluas partisipasi petani dan wanita tani, (b) memperkenalkan pendekatan pertanian agroekologis dan organik, (c) menerapkan prinsip kecukupan sendiri dan menghindari ketergantungan pada perdagangan luar, (d) melakukan reformasi agraria, (e) menghormati pengetahuan masyarakat adat, dan (f) mengembangkan keanekaragaman hayati sumber bahan pangan untuk memenuhi kecukupan pangan global.

Pekerjaan besar yang harus dilakukan adalah menemukan model kelembagaan penyuluhan pertanian tertentu, agar aspirasi yang sebangun dengan hak-hak petani tersebut dapat menjadi kesadaran penuh dan perilaku aktual petani untuk mewujudkan petani sejati, justru di tengah iklim sosial-ekonomi-politik yang menurut Wahono (1999a) menghambat terwujudnya petani sejati, yaitu hegemoni negara dan dominasi praktek pergerakan modal perusahaan global, serta sikap petani yang takut menanggung resiko. Pada kondisi ini jadi menarik menelaah pemikiran Gramsci (1971) dalam Fakih (1996) yang melukiskan pendidikan, budaya dan kesadaran kritis, sebagai daerah perjuangan yang sangat penting untuk melawan hegemoni negara dan dominasi modal, sekaligus melakukan transformasi sosial menuju relasi sosial yang lebih adil.

“Masyarakat dengan relasi sosial yang lebih adil” dikemukakan oleh

para pakar dalam beberapa terminologi berbeda (sesuai ilmu dan fokus studi pakar tersebut)⁴, yang intinya melukiskan kualitas masyarakat idaman di mana semua warga termasuk petani menjalani kehidupan dengan hak-hak dan kewajiban yang ada secara manusiawi dan adil (Fakih, 1999). Korten (2002) merindukan masyarakat pasca-kapitalisme berpusat pada kehidupan (bukan pada pertumbuhan ekonomi) sebagai masyarakat beradab yang adil, lestari dan peduli terhadap sesama. Dalam konteks pembangunan pertanian, ada tiga konsep yang dapat disimak menjadi pintu masuk mencapai masyarakat idaman itu, yaitu: (a) pertanian berkelanjutan dengan input-luar rendah/*Low External Input and Sustainable Agriculture* (Reijntjes, Haverkort, and Waters-Bayer, 1999); (b) pertanian organik yang didukung oleh masyarakat/*Organic and Community-Supported Agriculture* (Korten, 2002); dan (c) pertanian yang peduli kepada sesama, alam semesta, kearifan lokal, dan keanekaragaman hayati (Wahono, 2004). Ketiga konsep tersebut berakar pada konsep pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) yaitu pertanian yang mantap secara ekologis, berkelanjutan secara ekonomi, adil dalam distribusi sumberdaya, bersifat manusiawi dan

⁴ Beberapa terminologi para pakar untuk menjelaskan kualitas masyarakat idaman tersebut adalah : *Civil Society* (Gramsci, 1971), *The Good Society* (Bellah, 1992), *The Spirit of Community* (Etzioni, 1993), Demokrasi Sosial dalam *The Third Way* (Giddens, 1998), Masyarakat Madani (Madjid, 1999), Masyarakat Adab (Wirutomo, 2001).

adaptif (Gips, dalam Reijntjes, Haverkort and Waters-Bayer, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan pokok yang mesti dijawab adalah: model kelembagaan penyuluhan pertanian yang bagaimanakah yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan petani di dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan? Pertanyaan itu mesti dijawab melalui penelitian mendalam dan komprehensif, namun untuk artikel yang terbatas kapasitasnya, pertanyaan dasar yang hendak dijawab melalui telaah literatur adalah: bagaimana perspektif penyuluhan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani itu tersebut?

PENYULUHAN PEMBANGUNAN MEMBENTUK MASYARAKAT BERMARTABAT

Pembangunan adalah upaya mencapai taraf hidup rakyat yang lebih ber-kualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Berbagai kajian banyak menyatakan, partisipasi rakyat yang besar seharusnya ada di dalam seluruh proses pembangunan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya berarti pengerahan tenaga kerja rakyat secara sukarela, tetapi justru yang lebih penting tergerakannya rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersedia melalui pembangunan guna memperbaiki kualitas hidupnya sendiri (Slamet, 1992; 2003). Namun pengalaman empiris menunjukkan tidak dengan sendirinya rakyat mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Kemampuan rakyat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan harus didahului oleh *proses belajar* untuk memperoleh dan memahami informasi, serta memprosesnya menjadi pengetahuan tentang adanya kesempatan-kesempatan bagi dirinya, kemudian melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Jika rakyat telah bertindak menuju perbaikan kehidupannya, barulah dikatakan rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan (Slamet, 1992; 2003 dan Sumardjo, 1999).

Agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara baik dan dalam waktu relatif singkat, diperlukan usaha-usaha khusus yang bersistem dan berstrategi di bidang pendidikan non-formal yang berfungsi memfasilitasi rakyat mengalami proses belajar agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan untuk memperbaiki diri sendiri. Inilah ruang lingkup peran strategis penyuluhan pembangunan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu tugas itu menjadi lebih mudah, adalah ilmu penyuluhan pembangunan. Ilmu penyuluhan pembangunan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah, sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang membawa perbaikan kualitas hidup orang yang bersangkutan (Slamet, 1992).

Ilmu penyuluhan pembangunan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep dari berbagai disiplin

ilmu yang relevan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan manajemen. Penyuluhan pembangunan selalu fokus kepada perbaikan mutu kehidupan manusia, secara lahir dan batin, sehingga kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain, seperti ekonomi, pertanian, kesehatan, dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya. Ilmu penyuluhan pembangunan tidak akan pernah berdiri sendiri, tetapi sering dikatakan bersifat interdisiplin (Slamet, 1992). Ilmu penyuluhan pembangunan, pada awal kegiatannya dikenal sebagai penyuluhan pertanian (*Agricultural Extension*) yang berkembang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda. Kemudian penggunaannya ternyata meluas pada bidang-bidang lain, maka namanya menjadi *Extension Education*, yang di beberapa negara disebut *Development Communication*. Meskipun ada perbedaan, namun pada dasarnya semua mengacu kepada disiplin ilmu penyuluhan pembangunan, sebagai pengembangan dari penyuluhan pertanian.

Falsafah dasar ilmu penyuluhan pembangunan adalah menolong orang, agar orang tersebut mampu menolong dirinya, melalui pendidikan, yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau "*to help people to help themselves through educational means to improve their level of living*" (Slamet, 1969). Dalam falsafah dasar itu terkandung makna dan prinsip-prinsip hakiki penyuluhan, yaitu penyuluhan adalah proses: (a) pendidikan, (b) dialogis, (c) konvergen, (d) demokratis,

dan (e) berkelanjutan; yang akan mampu memberdayakan masyarakat, serta bukan praktek penyuluhan yang bersifat linier, *top-down* dan mengabaikan potensi masyarakat, yang akan memperdayakan dan menciptakan ketergantungan masyarakat (Sumardjo, 1999).

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, memandu masyarakat peserta penyuluhan untuk melakukan perubahan perilaku dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya; sebagai proses demokrasi, penyuluhan memfasilitasi suasana bebas bagi pengembangan kemampuan peserta penyuluhan dalam berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalah, merencanakan dan bertindak secara bersama-sama, dari, oleh dan untuk mereka; sebagai proses berkelanjutan, penyuluhan dimulai dari keadaan petani pada waktu itu menuju ke arah yang mereka kehendaki, berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang selalu berkembang yang dirasakan oleh peserta penyuluhan (Sumardjo, 1999). Bila penyuluh melihat adanya satu kebutuhan, namun kebutuhan itu belum dirasakan oleh peserta penyuluhan, padahal kebutuhan itu dinilai sangat mendesak, maka penyuluh terlebih dahulu perlu berusaha melakukan proses penyadaran akan kebutuhan nyata itu (*real need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) oleh peserta penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan bukan sekedar kegiatan penerangan tentang kebijakan penguasa, bukan hanya kegiatan disseminasi teknologi produksi, bukan pula program kedermawanan yang darurat, dan bukan program

untuk mencapai tujuan yang bukan kepentingan kelompok sasaran. Penyuluhan pembangunan adalah program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran, meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri, dan membangun masyarakat madani (Slamet, 2000). Oleh karenanya, Susanto (2000) menegaskan, praksis penyuluhan pembangunan tidak boleh terjebak dalam tatanan masyarakat atau politik yang *top-down*, serba seragam, mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat arus bawah, tidak demokratis, serta tidak kompetisi bebas dan terbuka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurut Susanto (2000), harus dimaknai sebagai *people's programme facilitated or help by the government*; dimana yang terjadi adalah proses pemberian pengakuan dan penghargaan (*recognition*) kepada potensi masyarakat, menuju penguatan jati diri dan harkat martabat masyarakat. Karena pentingnya konsep partisipasi dan pembangunan masyarakat yang bersifat *bottom-up*, maka ilmu penyuluhan pembangunan harus masuk kepada ranah perilaku yang terkait fenomena martabat dan harkat manusia, dengan melakukan dua peran sekaligus, yaitu : (a) melakukan proses penyadaran, agar masyarakat tahu, mau, dan mampu meningkatkan perilaku yang lebih bermartabat, dan (b) menjembatani kesenjangan (*bridging the gap*) antara pola-pola perilaku lama yang cenderung menyebabkan masyarakat tidak kunjung terangkat dari kondisi ketidak-berdayaan dan stagnan, dengan

pola perilaku baru yang diinginkan sesuai dengan cita-cita hakiki pembangunan, yang dilukiskan oleh Misra (1981) sebagai "*real meaning of development is an increasing attainment of one's own cultural values*"⁵. Masyarakat bermartabat adalah, individu atau kelompok individu di dalam masyarakat yang ketika melakukan proses pemenuhan segala kebutuhannya selalu sadar tentang kewajiban dan hak-haknya, tidak mengambil yang bukan haknya, memegang teguh aturan dan tatanan sosial tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta mengembangkan budaya penghormatan terhadap harga diri sendiri dan orang lain (Bellah, 1992; Etzioni, 1993; Giddens, 1998; Madjid, 1999; Wirutomo, 2001). Jika masyarakat telah memiliki perilaku yang lebih berbudaya dan bermartabat, maka ilmu penyuluhan pembangunan dapat dikatakan berhasil dalam perannya di tengah masyarakat. Dengan pemikiran di atas, Susanto (2000) percaya akan diperoleh tiga keuntungan sekaligus, yaitu : (a) tumbuh berkembangnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, (b) semakin berkurangnya beban dan tanggungjawab administratif pemerintah karena se-

⁵ Pencapaian taraf hidup yang lebih baik dan sejahtera sebagai hasil pembangunan, menurut Misra (1981), dicirikan empat indikator, yaitu : (a) tersedianya barang dan jasa bagi keberlanjutan hidup dasar manusia untuk semua secara lebih banyak dan lebih baik, (b) penghormatan terhadap harga diri sendiri dan orang lain, (c) bebas dari segala bentuk tirani dan kekerasan, dan (d) kehidupan masyarakat yang mempunyai dan memberikan rasa memiliki.

makin berkurang ketergantungan masyarakat terhadap aturan-aturan pemerintah, dan akhirnya (c) akan muncul kondisi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sebagai cermin, ada baiknya sedikit menelaah tentang masyarakat kota Madinah semasa Khalifah Rasul, yang menurut Bellah (dalam Madjid, 1999) memiliki tatanan sosial politik sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zaman dan tempatnya. Masyarakat Madinah tersebut memiliki ciri-ciri modernitas yang nantinya diidentifikasi sebagai penciri utama *civil society* atau masyarakat madani atau masyarakat berperadaban. Ciri-ciri modernitas itu adalah: (a) memiliki tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari seluruh masyarakat, (b) ada keterbukaan posisi kepemimpinan dengan ukuran kecakapan pribadi atas dasar pertimbangan obyektif, universal dan bukan keturunan, (c) menegakkan prinsip kemajemukan, toleransi, serta mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang agama dan suku (kota Madinah terdiri dari beragam agama dan suku) berdasarkan Piagam Madinah atau disebut Konstitusi Madinah (sebagai dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia), dan (d) masyarakat yang tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan dalam supremasi hukum dan peraturan.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mengemban amanah pemimpinnya, yang dikemukakan pada kesempatan khutbah perpisahan; yaitu *life, property, and dignity* atau *life, fortune, and sacred honor*. Suatu

amanah yang bertolak dari kesucian hidup, harta, dan martabat kemanusiaan, sehingga tidak boleh dilakukan pengambilan tanpa hak atasnya. Inilah masyarakat bertaqwa yang mewujudkan titah suci Tuhan: *Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling me-kenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa* (Q.S. 49 : 13). *Berbuatlah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa* (Q.S. 5 : 8). Ketaqwaan yang dimaksud bukan kesalahan ritual individu belaka, tetapi yang paling penting kesalahan sosial yang berwujud selalu mampu berbuat adil di tengah masyarakat. Menurut Madjid (1999) inti pernyataan ini menyebar ke dunia Barat melalui filsafat kemanusiaan Gionavi Pico della Mirandola dan juga kepada John Locke yang mempengaruhi pemikiran para pendiri Amerika Serikat, sehingga dapat dibaca dalam *Declaration of Independence*. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian, menurut Slamet (2000) adalah masyarakat yang berdaulat, komunikatif, menerima pluralitas, adaptif terhadap perubahan, swadaya tinggi, selalu mengembangkan diri, tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya, dan berani mengambil keputusan. Sejalan dengan itu, untuk masyarakat Indonesia saat ini, menurut Kuntowijoyo (1998) dibutuhkan ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke mana, untuk apa dan

oleh siapa transformasi sosial itu dilakukan. Nilai dasar arah yang ditawarkan Kuntowijoyo untuk perubahan sosial adalah *humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi*, yang diderivasi dari misi historis Islam yaitu:

Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (al-ma'ruf atau humanisasi dan emansipasi), mencegah kemungkaran (liberasi atau pembebasan manusia dari segala bentuk tirani, kekejaman, kemiskinan dan ketertindasan struktural), dan beriman kepada Allah (menegakkan dimensi transendental dalam kebudayaannya) (Q.S. 3: 110).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa hakikat atau ontologi ilmu penyuluhan pembangunan adalah mempelajari atau mengkaji pola perilaku manusia pembangunan, dan bagaimana pola perilaku manusia itu dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku yang lebih bermartabat dan membawa perbaikan kualitas hidup orang yang bersangkutan dan masyarakatnya. Sedangkan aksiologi atau nilai kegunaan ilmu penyuluhan pembangunan adalah untuk membantu masyarakat, melalui pendidikan, agar mampu dan berdaya menolong dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat hidupnya dan masyarakatnya. Singkatnya, ilmu penyuluhan pembangunan berguna untuk

membantu membentuk masyarakat bermartabat.

Jika hakikat ilmu penyuluhan pembangunan (termasuk dalam pembangunan pertanian) adalah untuk membentuk masyarakat yang bermartabat, maka mengapa fakta menunjukkan pada umumnya penyuluhan pembangunan pertanian Indonesia justru tidak menjadikan petani sejati dan mandiri, bahkan mengalami dehumanisasi, yang sesungguhnya bertentangan dengan cita-cita masyarakat bermartabat itu sendiri. Seperti dinyatakan dua pakar penyuluhan pembangunan Indonesia, yaitu: (a) timbul persepsi masyarakat bahwa penyuluhan pertanian juga alat untuk meningkatkan produksi pertanian, dan bukan sebagai usaha unik untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani (Slamet, 2001); (b) praktek penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dari tujuan esensial, menjadikan petani rasional dan mandiri, tetapi justru selalu tergantung kepada dan digantung oleh pemerintah (Padmanagara, 1995).

Jadi, yang diperlukan sekarang adalah mewujudkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berjalan di atas falsafah dan tujuan dasarnya, yaitu menolong menjadikan petani dan keluarganya untuk mampu dan berdaya, melalui pendidikan, agar mereka mandiri, sejahtera, sejati, dan bermartabat.

PRADIGMA TEORI PERUBAHAN BAHAN SOSIAL

Epistemologi atau cara mendapatkan ilmu penyuluhan pembangunan itu sama dengan ilmu-ilmu

sosial lainnya, yaitu melalui metodologi ilmiah. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana disiplin ilmu itu lahir, berkembang, dan mengalami perubahan. Pertanyaan ini terkait dengan istilah paradigma ilmu yang menjadi sangat terkenal setelah Khun (1962) menerbitkan buku berjudul *'The Structure of Scientific Revolution'*, yang menguraikan proses kelahiran, perkembangan, dan perubahan suatu ilmu. Menurut Khun, suatu disiplin ilmu lahir bukan melalui proses akumulasi linier dari serangkaian pembuktian hipotesis, namun sebagai akibat proses transformasi revolusioner yang dimulai dengan penciptaan seperangkat paradigma (Suwarsono dan So, 2000). Paradigma adalah : (a) kerangka referensi, definisi situasi atau bentuk umum pandangan dunia yang menjadi dasar pijakan keyakinan suatu teori (Khun, 1962) ; (b) konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan dan prosedur yang digunakan oleh nilai dan tema pemikiran (Popkewitz, 1984 dalam Fakhri, 2002a); (c) tempat berpijak atau alat cara pandang suatu teori dalam melihat realitas sosial (Fakhri, 2002a), karena konstelasi teori dikembangkan untuk memahami dan memberi makna atas kondisi sejarah dan realitas sosial.

Konsolidasi paradigma itu tercapai jika mendapat pengakuan dari masyarakat ilmiah pendukungnya melalui berbagai kegiatan ilmiah, yaitu: penelitian klasik, penulisan dan penerbitan buku teks, serta pengembangan dan penerapan kurikulum. Konsolidasi paradigma menunjukkan pola umum, persoalan pokok, metode

dan alat analisis serta kemungkinan pemecahan masalah yang diajukan oleh ilmu tersebut (Friedrichs dalam Suwarsono dan So, 2000). Kekuatan paradigma terletak pada kemampuannya mengarahkan kepada: apa yang dilihat dan bagaimana cara melihat, apa yang ingin dan tidak ingin diketahui, apa yang dianggap masalah, dan masalah apa yang bermanfaat dipecahkan, serta metode yang digunakan di dalam penelitian dan penerapan (Khun, 1962); sehingga satu paradigma dapat mempengaruhi pandangan tentang 'adil atau tidak adanya' fenomena dan 'baik atau buruknya' program. Misalnya, tentang relasi laki-laki dan perempuan atau majikan dan buruh; suatu paradigma melihat "hubungan yang harmonis, saling membantu dan tidak ada masalah; tetapi paradigma lain menyebutnya hubungan yang hegemonik, dominasi jender dan eksploitatif". Adalah tidak relevan membahas paradigma mana yang benar atau salah, karena setiap paradigma punya visi, nilai dan semangat tertentu ketika melihat fenomena. Kemenangan satu paradigma atas paradigma lain itu karena kekuasaan dan kekuatan pendukung paradigma yang menang itu lebih besar dan kuat (bukan karena paradigmanya lebih benar) daripada kekuasaan dan kekuatan pendukung paradigma yang kalah itu (Ritzer, 1975 dalam Fakhri, 2002a).

Menurut Khun (1962) tidak lama setelah paradigma mencapai kemapanan biasanya akan muncul penyimpangan, dan ketika beban penyimpangan makin besar yang tidak dapat diatasi oleh paradigma itu, ma-

ka terjadi 'revolusi ilmiah'. Paradigma baru lahir dan memantapkan definisi serta metode kajian baru, buku teks dan jawaban atas isu-isu standar. Pada batas tertentu, pendapat Khun itu (Suwarsono dan So, 2000) dapat membantu menjelaskan perubahan perspektif pembangunan. Perspektif modernisasi (lahir tahun 1950) sebagai paradigma menguji pembangunan negara-negara di dunia ketiga, yang ditandai hasil-hasil kajian Rostow, McClelland, Inkeles, Bellah, dsb, sangat mempengaruhi agenda penelitian dan program pembangunan; yaitu bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diubah untuk memfasilitasi proses pembangunan guna mengikuti modernisasi Amerika Serikat. Ketika perspektif modernisasi gagal menjelaskan apa yang terjadi di Amerika Latin tahun 1960-an, lahirlah perspektif baru (yaitu: dependensia) yang ditandai dengan hasil-hasil kajian Dos Santos, Frank, dan Baran, telah merumuskan agenda penelitian untuk menguji akibat negatif dominasi asing; maka terjadilah perdebatan paradigma. Namun model Khun tidak dapat menjelaskan keuletan paradigma lama dari serangan paradigma baru. Ketika dependensia makin populer di kalangan muda akademisi, memang modernisasi kehilangan daya persuasi di akhir tahun 1960 dan perspektif sistem dunia mulai memberi daya tarik di tahun 1970; tetapi tidak cukup bukti perspektif modernisasi lenyap dan mati, karena penelitian dan jurnal modernisasi tetap berlangsung. Khun juga tidak melihat kemampuan paradigma melakukan adaptasi (contoh: muncul perspektif modernisasi

baru), dan juga tidak mengenal adanya kemajemukan teori, ketika literatur pembangunan dicirikan koeksistensi damai antara perspektif modernisasi, dependensia dan sistem dunia, sejak pertengahan tahun 1970, karena tidak satupun dari ketiga perspektif itu yang mampu secara total menghilangkan peran perspektif lain dan kemudian tegak sendirian (Suwarsono dan So, 2000; Fakhri, 2002a).

Uraian mengenai peta paradigma ilmu-ilmu sosial (termasuk perspektif pembangunan) diperlukan mengingat ada pertanyaan dasar yang muncul sejak lama dan menimbulkan debat panjang, dimana para pemikir ilmu-ilmu sosial (Comte, Durkheim, Weber, Marx, Stuart Mill, dsb) memberi jawaban dengan sangat hati-hati. Pertanyaannya ialah: *where is science in social science?* Neuman (1997) dalam buku *Social Research Methods* menjelaskan, pertanyaan itu memiliki jawaban ganda, dimana para peneliti ilmu sosial dapat memilih dari tiga paradigma alternatif yang tersedia, yaitu: (a) *positivisme*, (b) *ilmu sosial interpretif/tafsir*, dan (c) *ilmu sosial kritis*. Habermas (dalam Fakhri, 2000a) menyebutnya: (a) *instrumental knowledge*, (b) *interpretive knowledge*, dan (c) *emancipatory knowledge*. Setiap paradigma memiliki perangkat asumsi dan prinsip filosofis, teori, dan pendirian teknik penelitian tertentu. Namun, pertanyaan paling penting yang harus dijawab adalah, apa manfaat dan bagaimana sikap memahami paradigma ilmu sosial. Memahami suatu paradigma dan teori perubahan sosial, menurut Kun-

towijoyo (1998) dan Fakhri (2002a), adalah dalam rangka untuk menegakkan komitmen terjadinya proses emansipasi, humanisasi, liberasi, transformasi dan keadilan sosial. Sehingga pilihan terhadap paradigma dan teori atau perspektif pembangunan, bukan semata karena alasan benar atau salahnya suatu teori, tetapi lebih pada keyakinan teori mana yang berimplikasi dapat menciptakan hubungan-hubungan dan struktur sosial yang lebih emansipatif, liberatif, transformatif, dan adil.

Positivisme atau **instrumental knowledge** adalah paradigma yang dianut oleh Auguste Comte (1798–1857), Emile Durkheim (1858–1917), J. S. Mill (1806–1873) dan paling luas dipakai dalam ilmu-ilmu sosial. Positivisme ilmu-ilmu sosial adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dipinjam dari pendekatan dan metode ilmu-ilmu alam, ketika memahami dan mendominasi realitas objek studi, dan memberikan penjelasan bersifat universal dan generalisasi (percaya ada pola hukum tetap atas fenomena tertentu di semua tempat dan waktu). Positivisme memandang ilmu-ilmu sosial sebagai metode terorganisasi yang mengkombinasikan logika deduktif dengan pengamatan empiris-seksama atas perilaku individu untuk menemukan seperangkat hukum sebab-akibat bersifat peluang (*probabilistic*), yang dapat dimanfaatkan memprediksi pola umum aktivitas manusia. Contoh teori positivisme yang terkenal adalah teori sosiologi “struktural-fungsional” yang berakar pada filsafat keteraturan, ketertiban, keterpaduan dan stabilitas sosial,

yang mengedepankan rekayasa sosial dalam perubahan sosial. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah ber-ciri obyektif (tidak subjektif), netral (tidak memihak), rasional (tidak emosional dan tidak empati), bebas nilai, dan menjaga jarak terhadap objek studi; serta lebih sering melalui eksperimen atau survey yang memanfaatkan data kuantitatif (Neuman, 1997).

Ilmu sosial interpretatif/tafsir atau interpretive knowledge ialah paradigma yang dianut Marx Weber (1864–1920) dan Wilhelm Dilthey (1833–1911) [disebut *Chicago School of Sociology*] yang memandang, ilmu-ilmu alam itu berdasarkan pada *erklarung* (*abstract explanation*) atau penjelasan-penjelasan abstrak tentang fenomena alam, sedangkan ilmu-ilmu sosial lebih berakar pada *verstehen* atau pemahaman empatik, yang diperlukan untuk mempelajari tindakan sosial dengan tujuan tertentu (*meaningful social action*) yang terkait dengan pikiran-pikiran dan motivasi-motivasi personal. Ilmu sosial interpretatif berkaitan dengan *hermeneutics*, yang ditemukan dalam ilmu-ilmu *humanity* (filosofi, sejarah, budaya, bahasa, sastra, dan studi agama), yang menyatakan ilmu-ilmu sosial itu hakikatnya dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial apa adanya (semboyannya: “biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri”). Penelitian dikerjakan dengan metodologi kualitatif melalui pengamatan partisipatif serta penelitian lapangan langsung dan rinci didalam suasana alami untuk mencapai suatu pemahaman

dan intepretasi bagaimana manusia menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka (Neuman, 1997).

Ilmu sosial kritis atau ***emancipatory knowledge*** adalah paradigma yang dianut oleh Karl Marx (1818–1883), Sigmund Freud (1856–1939), Erich Fromm (1900–1980), Jurgen Habermas (1929-) yang dikenal dengan *Frankfurt School*. (Anthony Gramsci dan Paulo Freire juga menganut paradigma ini walaupun dengan varian yang berbeda). Paradigma ini mendefinisikan ilmu-ilmu sosial sebagai proses kritis dari *inquiry* (penelitian alamiah), yang bekerja melebihi batas-batas permukaan ilusi untuk membongkar struktur-struktur nyata di dalam dunia material, guna menolong orang-orang yang termarginalkan dan tertindas, merubah kondisinya dan membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi mereka. Karenanya paradigma ini menganjurkan ilmu-ilmu sosial tidak boleh netral dan tidak hanya terlibat dalam teori abstrak-spekulatif, tetapi selalu mengamati realitas sosial dalam perspektif kesejarahan, yang dikaitkan dengan pemihakan atas upaya emansipasi kehidupan masyarakat sehari-hari (Neuman, 1997). Biasa disebut sebagai metodologi alternatif, yang berdasar pada dialektika materialisme, analisis kelas, dan strukturalisme, dengan pendekatan holistik, yang menghindari cara berfikir deterministik dan reduksionis. Sehingga ilmu sosial kritis tidak menempatkan rakyat sebagai objek penelitian yang pasif dan objek rekayasa sosial yang dirancang para ahli perencana di luar; tetapi menempatkan rakyat sebagai subjek utama

proses perubahan dan perencanaan sosial, serta penciptaan dan pengawasan atas pengetahuan yang diperoleh melalui *participatory research* (penelitian partisipatori).

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ilmu penyuluhan pembangunan lahir dari perspektif modernisasi, yang mengkaji bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah dari perilaku lama (dapat ditafsirkan sebagai tradisional atau juga stagnan) menuju perilaku baru (dapat ditafsirkan sebagai modern dan bermartabat) melalui pembangunan. Ilmu penyuluhan pembangunan diperoleh dan dikembangkan (epistemologi) melalui paradigma positivisme, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti jalan interpretative dan kritis melalui penelitian dengan metodologi kualitatif-partisipatif. Sedangkan aksiologi atau nilai kegunaan ilmu penyuluhan pembangunan adalah untuk membantu masyarakat, melalui pendidikan, agar mampu dan berdaya menolong dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat hidupnya dan masyarakatnya. Singkatnya, ilmu penyuluhan pembangunan berguna untuk membantu dan memfasilitasi pembentukan masyarakat bermartabat. Namun pada praktiknya pernah terjebak sebagai alat untuk meningkatkan produksi (misal: pertanian padi) dan mengabaikan peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini yang menyebabkan munculnya kembali penegasan

perspektif ilmu penyuluhan pembangunan yang hakikatnya untuk membantu memberdayakan masyarakat (termasuk petani menuju kesejatiannya) melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan petani sejati dan bermartabat (yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan berwawasan ekologi; yang ditandai dengan tingkat modernitas, partisipasi dan daya saing petani); harus lebih dahulu mempelajari tentang sistem pendidikan petani (apakah memberdayakan petani), kelembagaan penyuluhan pertanian (apakah kompatibel dan efektif dengan kesejatiannya petani), serta apakah peran negara dan lembaga terkait kondusif dan menopang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syamsuddin. 1995. "Sembilan Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- _____. 1999. "Pengantar Edisi Indonesia." Dalam Reijntjes, Coen; Haverkort, Bertus; dan Waterbayer, Ann (eds) *Pertanian Masa Depan: Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah* (terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.
- Fakih, Mansour. 2002a. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Giddens, Antony. 1998. *The Third Way*. Blackwell Publisher Ltd.
- Korten, David. C. 2002. *Kehidupan Setelah Kapitalisme (The Post Corporate World—alih bahasa)*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Pembinaan Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*. Makalah untuk Raker-nas ICMI, tanggal 10 Juli 1999 di Bandung.
- Misra, R.P. 1981. "The Changing Perception of Development Problems." Dalam Misra, R.P dan M. Honjo (eds.) *Changing Perception of Development Problems*. Volume 1. Maruzen Asia for and on behalf of the United Nations Centre for Regional Development. Singapore.
- Neuman, Lawrence. W. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon Publisher.
- Padmanagara, Salmon. 1995. "Sumbang Saran Tambahan Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Puspadi, Ketut. 2001. "Rekonstruksi Sistem Penyuluhan." *Makalah*, yang merupakan bagian dari disertasi penulis, disampaikan pada Seminar

- PERHIPTANI di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 21 Oktober 2001.
- Reijntjes, Coen; Haverkort, Bertus; dan Water-Bayer, Ann. 1999. *Pertanian Masa Depan: Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Schoorl, J.W. 1988. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Slamet, Margono. 1992. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas." Dalam Aida V.S. Hubeis, dkk (eds) *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara..
- _____. 1995. "Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- _____. 2000. "Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan." Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, IPB, 25-26 September 2000. Bogor.
- _____. 2001. "Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah." *Makalah Seminar PERHIPTANI di Universitas Siliwangi Tasikmalaya 21 Oktober 2001*. IPB, Bogor.
- Soebiyanto, F.X. 1998. "Peranan Kelompok dalam Pengembangan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusahatani." *Disertasi PPs IPB, Bogor* (tidak diterbitkan).
- Sumardjo. 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani." *Disertasi PPs IPB, Bogor* (tidak diterbitkan).
- Susanto, Djoko. 2000. "Pendekatan Paradigma Baru Ilmu Penyuluhan Pembangunan." *Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, IPB, 25-26 September 2000, Bogor*.
- Suwarsono dan So, Alvin Y. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Wahono, Francis. 1994. "Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 tahun Revolusi Hijau." Dalam *PRISMA*, No. 3, Maret 1994. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- _____. 1999a. "Petani: dari Konflik menuju Demokrasi." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. IV/1999. Penerbit Insist, Yogyakarta.
- _____. 1999b. "Revolusi Hijau : dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. IV/1999. Penerbit Insist, Yogyakarta.
- _____. 2000. "Menuju Penguatan Hak-hak Petani: Melalui Gerakan Petani Organik." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. VII/2000. Penerbit Insist Press, Yogyakarta.
- _____. 2004. "Depolitisasi Pangan: Sebuah Upaya Mengangkat Kearifan Lokal dan Mendayagunakan Keanekaragaman Hayati." Dalam Wahono dkk. (eds) *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.

STRATEGI PENYIAPAN PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN RINGAN PEREMPUAN MINANGKABAU

Nofialdi, Hasnah dan Rina Sari

Abstract: *The paper examines the entrepreneurship of women who run food small scale enterprises in Padang, Bukittinggi and Payakumbuh. It is found that; first, the West Sumatra's women are ready for the business. Second, the women entrepreneur can contribute to family's income and provide job for unemployed workers. In contrary they spend less time for domestic works and take care their family. Third, in order to prepare the women for the business, development strategies are needed such as: increasing the assets, marketing, improving human resources and enhancing the understanding of family's value, culture and religion.*

Kata Kunci: *perempuan, industri, wirausaha, makanan ringan, minang kabau, SWOT*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Minangkabau panggilan seorang perempuan berkeluarga sebagai “urang rumah” yang berarti orang yang berada dirumah. Perempuan adalah yang pantas melakukan pekerjaan dirumah, walaupun ada beberapa pekerjaan di luar rumah yang bisa diterima masyarakat seperti guru, bidan dan bertani. Peranan seorang perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal sangat penting sekali karena pusaka tinggi dimiliki dan dikuasai ibu dan anak perempuannya dalam garis keturunannya yang pemanfaatannya diatur dan dikelola oleh saudara lakinya atau mamak dari anaknya (Wahyuni dan Hasnah, 1998).

Saat ini telah terjadi pergeseran sosial budaya pada masyarakat Minangkabau, yang pada mulanya mamak yang bertanggung jawab atas jodoh, biaya hidup dan pendidikan kemenakannya (anak saudara perempuannya) yang melebihi tanggung jawab terhadap anak dan

istrinya. Perubahan itu disebabkan oleh mulai lunturnya hubungan kekerabatan di masyarakat Minangkabau sehingga makin besar tanggung jawab orang tua (khususnya bapak) pada anak dan keluarganya. Pergeseran itu juga terjadi pada perempuan Minangkabau yang awalnya hanya mengerjakan pekerjaan di rumah menjadi bekerja diluar rumah pencari nafkah karena alasan ekonomi keluarga.

Dalam dua dekade terakhir ini keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja formal mencapai jumlah yang luar biasa. Secara kuantitatif kaum perempuan merupakan 55 % dari angkatan kerja pada sektor formal dan informal, dan tidak kalah penting mereka menduduki peringkat utama dari angkatan kerja di rumah. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki walaupun angkatan kerja wanita lebih besar dari angkatan kerja laki-laki.

Adanya budaya merantau telah mengakibatkan banyak laki-laki Minangkabau yang pergi ke luar Sumatera Barat untuk belajar dan mencari pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan urusan mencari nafkah keluarga mulai banyak diambil alih oleh perempuan dan ditambah lagi adanya kecenderungan laki-laki Minangkabau di Sumatera Barat berkurang melakukan kegiatan yang produktif (berbeda dengan diperantauan) (Latif, 2002). Kondisi inilah yang menyebabkan keterlibatan perempuan Minang dalam sektor ekonomi meningkat baik dalam sektor formal maupun informal. Saat ini keterlibatan perempuan tersebut tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga ada kecenderungan bagi perempuan Minang mulai terlibat sebagai pengelola (menejer) pada bidang perdagangan dan industri kecil yang berupa industri keluarga.

Kemampuan kerja perempuan sebagai pengelola diduga akan lebih baik dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena kecermatan perempuan dalam mengatur keuangan, kepekaan dan bisa mencari peluang yang lebih baik (misalnya: mensiasati keterbatasan modal, menemukan peluang pasar, dan lain-lain). Tetapi perempuan yang berperan di luar rumah seringkali masih mendapatkan hambatan, baik hambatan kultural maupun hambatan sosial dan ekonomi.

Keterlibatan perempuan di sektor publik, membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Di satu pihak, perempuan bekerja dapat berperan membantu ekonomi keluarga dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, disisi lain

peranannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas di luar rumah tangga (publik). Kenyataannya pembantu keluarga di Indonesia adalah bukan membantu pekerjaan ibu keluarga melainkan mengambil alih pekerjaan ibu keluarga. Ini menggeser fungsi ibu keluarga. Akibatnya ibu keluarga merasa kehilangan fungsi. Karena dalam kehidupan sehari-hari, suami dan anak-anak tidak bergantung kepadanya. Hilangnya rasa saling bergantung sesama anggota keluarga, tidak bisa melahirkan rasa saling asih, asah dan asuh. Ini membahayakan kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat itu adalah keluarga besar yang terbentuk dari unit-unit keluarga itu.

Sejauhmana kesiapan diri perempuan Minangkabau dalam memasuki dunia bisnis (menyangkut karakteristik, pendidikan, pengalaman, kompetensi, motivasi, *leadership*, dan lain-lain), apa konsekuensi (pengaruh) keadaan tersebut terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial keluarga. Untuk dapat sukses sebagai wirausaha perempuan maka diperlukan suatu strategi untuk memperbaiki kondisi saat ini dalam mencapai kondisi ideal, mengurangi ekses negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan perempuan dalam dunia bisnis ?

Karena masalah pengembangan wirausaha perempuan merupakan masalah yang kompleks yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor (elemen-elemen) yang saling berhubungan satu dengan lainnya maka studi ini dalam pelaksanaan dan perumusan

strateginya haruslah didekati secara menyeluruh atau pendekatan sistem.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada pengusaha perempuan pengolahan makanan ringan yang banyak terdapat di kota Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap maka dilakukan juga pengamatan dan wawancara dengan pemasok bahan baku, pedagang yang menjualkan produk dan keluarga pengusaha perempuan responden. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesiapan perempuan Minangkabau untuk memasuki dunia bisnis.
2. Melihat konsekuensi dan dampak keadaan tersebut terhadap aspek ekonomi (kontribusi terhadap pendapatan keluarga) dan aspek sosial keluarga.
3. Merumuskan strategi untuk menyiapkan perempuan Minangkabau untuk memasuki dunia bisnis untuk mencapai kondisi diinginkan, mengurangi eksek negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan perempuan dalam dunia bisnis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk program pemberdayaan perempuan dalam menyiapkan strategi menumbuhkan wirausaha perempuan yang mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan meningkatkan perempuan sebagai pengambil keputusan yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan kota Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh sebagai daerah yang banyak ditemui industri makanan kecil. Penelitian ini melibatkan 4 orang pengusaha perempuan untuk kota Padang, 3 orang untuk kota Bukittinggi dan 3 orang untuk kota Payakumbuh. Sedangkan pakar untuk penelitian ini adalah 1 orang pakar ekonomi pembangunan, 1 orang pakar agroindustri, 1 orang pakar sosiologi Minangkabau, 1 pakar agama Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: (1) menilai kesiapan dan pengaruh perempuan Minangkabau menjadi pengusaha pada bidang industri makanan ringan. Untuk tahapan ini dilakukan penelitian lapangan dengan pengamatan, daftar pertanyaan dan wawancara mendalam dengan perempuan, pemasok, penjual dan keluarga pengusaha perempuan. (2) melakukan diskusi dengan para pakar untuk lebih memahami permasalahan dan merumuskan strategi. Diskusi pakar ini dilakukan setelah terlebih dahulu disusun makalah yang dapat menggambarkan keragaan dari pengusaha perempuan pada industri makanan ringan yang telah diteliti. Diskusi dikembangkan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menyusun strategi untuk mencari kondisi ideal untuk mewujudkan wirausaha perempuan Minangkabau.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan pengamatan langsung dilapangan dengan observasi, wawancara mendalam dan daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder didapat dari studi pustaka dan pengumpulan data dan informasi dari bahan bacaan dan laporan instansi terkait.

Pekerjaan pengolahan data meliputi transfer, editing, tabulasi dan interpretasi data. Data-data dari daftar pertanyaan, pengamatan, wawancara mendalam didokumentasi kemudian dilakukan pengolahan dengan bantuan SPSS, ANP, dilakukan diskusi dalam tim untuk merumuskan permasalahan, menyusun keragaan pengusaha perempuan Minangkabau dan analisis situasi (internal dan eksternal). Kemudian ditentukan kesiapan pengusaha perempuan dengan metode skor yang telah dipersiapkan dan dirumuskan strategi awal dengan analisis SWOT.

Hasil rumusan kesiapan, keragaan, pengaruh dan strategi awal tersebut didiskusikan dengan pakar dalam suatu pertemuan. Hasil kesimpulan pertemuan tersebut menjadi bahan untuk memperbaiki analisis kesiapan, pengaruh pengusaha perempuan Minangkabau dan strategi mempersiapkan wirausaha perempuan Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pengusaha Perempuan Minangkabau Industri Makanan Kecil

Keterlibatan perempuan di sektor ekonomi bukanlah hal baru di tengah masyarakat. Dalam kon-

teks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti mengelola sawah, membuka warung di rumah, menjahit pakaian, menerima upah-an sulaman dan lain-lain. Keberadaan organisasi wanita seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menjadi bukti bahwa perempuan bisa eksis untuk berbisnis dan wirausaha. Proses pengembangan wirausaha perempuan tak lepas dari pengembangan kualitas SDM, modal, dan pasar.

Pengusaha perempuan Minangkabau industri makanan kecil adalah pengusaha industri skala kecil. Industri skala kecil adalah unit usaha disektor industri pengolahan yang mempekerjakan pekerja antara 1 orang sampai dengan 19 orang. Pada penelitian ini terdapat 10 orang wirausaha perempuan dalam industri maka-nan yang dijadikan responden yang rata-rata mempekerjakan 6 orang tenaga kerja.

Wirausaha perempuan yang diwawancarai masih dalam kategori usia produktif yang berumur antara 31-53 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah SMA (60 %). Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha perempuan yang dijadikan responden dalam penelitian ini sudah mempunyai bekal pendidikan formal yang memadai dalam menjalankan usahanya.

Jenis usaha yang dijalankan oleh responden adalah usaha industri makanan yang memproduksi kue, keripik, roti dan beras rendang. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh stereotype yang

melekat pada perempuan bahwa hal-hal yang berbau makanan sering menjadi tanggung jawab perempuan.

Kesiapan Perempuan Minangkabau Memasuki Dunia Bisnis

Penentuan kesiapan perempuan Minangkabau untuk memasuki dunia bisnis didasari dari karakteristik, pendidikan, pengalaman, kompetensi, motivasi, *leadership*, dan lain-lain. Penentuan kesiapan ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu : (1) diskusi kelompok terfokus (FGD) dan (2) jawaban daftar pertanyaan dari responden.

FGD dilakukan untuk penentuan kesiapan pengusaha perempuan industri makanan kecil yang berdomisili di kota Payakumbuh yang diikuti oleh 12 peserta berpendidikan S1 dari berbagai latar belakang ilmu dan pekerjaan. Hasil FGD menyimpulkan bahwa perempuan industri makanan kecil mampu untuk memasuki dunia bisnis karena :

1. figure yang ulet dan gigih
2. memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan kaum pria
3. dapat membagi waktunya dengan baik

4. lebih teliti dan tekun dibanding dengan kaum pria.

Penilaian kesiapan perempuan pengusaha makanan kecil memasuki dunia bisnis oleh responden berdasarkan indikator hasil diskusi pakar yang meliputi aspek-aspek : (1) ide-ide dan gagasan yang aktual, (2) daya cipta dan kreatif yang tinggi, (3) inisiatif, (4) bersifat positif, (5) daya gerak dan percaya diri, (6) daya pikat untuk bekerja sama, (7) mencegah timbulnya hambatan diri sendiri, (8) selalu belajar meningkatkan kemampuan diri, (9) pendidikan yang baik, (10) pengalaman berusaha, (11) motivasi, dan (12) kepemimpinan. Masing-masing aspek diberi penilaian dengan baik, sedang atau kurang. Seorang perempuan Minangkabau untuk memasuki dunia bisnis dinyatakan mempunyai kesiapan bila hasil agregasi nilainya adalah baik dan sedang. Responden memberikan penilaian terhadap kondisi teman-temannya sesama perempuan pengusaha makanan kecil.

Berdasarkan penilaian terhadap kesiapan perempuan pengusaha makanan kecil diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,6 (Tabel 1) yang berarti bahwa kesiapan perempuan memasuki dunia bisnis masuk dalam kategori baik.

Tabel 1. Skor Penilaian Kesiapan Perempuan Pengusaha Makanan Kecil

Respon-den	Indikator Kesiapan Perempuan Pengusaha Makanan Kecil												π
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2,5
2	3	3	3	2	3	2	1	3	1	3	2	3	2,4
3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2,8
4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,8
5	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2,2
6	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2,4
7	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	3	3	2,7
8	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	1	2,6
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,9
10	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2,3
π	2,6	2,7	3,0	2,4	2,8	2,7	2,3	2,6	2,2	2,3	2,6	2,4	2,6

Keterangan : Nilai 3 = baik, 2 =sedang, 1=kurang

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata skor yang tertinggi terletak pada indikator yang ke-3 yaitu inisiatif. Sementara pada indikator bersifat positif, mencegah timbulnya hambatan diri sendiri, pendidikan yang baik, pengalaman berusaha, dan indikator kepemimpinan, mempunyai skor rata-rata di bawah 2,5. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian untuk mengembangkan ke empat indikator tersebut agar wirausaha perempuan benar-benar siap bersaing dengan pebisnis yang tangguh.

Konsekuensi dan Dampak Usaha Perempuan terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial Keluarga

Keterlibatan perempuan di sektor publik menjadi pengusaha pada industri makanan, membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga.

Perempuan yang bekerja pada industri makanan tersebut dapat berperan membantu ekonomi keluarga dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, disisi lain peranannya dalam urusan rumah tangga menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas di luar rumah tangga.

Ada beberapa motif yang mendorong perempuan Minangkabau memasuki sektor publik (Tabel 2). Berdasarkan penilaian terhadap motif responden bekerja ternyata alasan utamanya adalah untuk menambah penghasilan keluarga yang mempunyai nilai skor tertinggi yaitu 26, diikuti dengan alasan mempunyai minat dan keahlian tertentu (bobot 15), memanfaatkan waktu lowong (bobot 10) dan melanjutkan usaha keluarga (bobot 7) yang dapat dilihat pada Tabel 2. Hal ini ini membuktikan bahwa faktor ekonomi

merupakan alasan utama bagi perempuan untuk masuk ke dunia kerja.

Tabel 2. Motif Reseponden Pengusaha Perempuan Minangkabau Bekerja

No	Motif Bekerja	Skor
1	Menambah penghasilan keluarga	26
2	Melanjutkan usaha keluarga (turun temurun)	7
3	Mempunyai minat dan keahlian tertentu	15
4	Memperoleh status di masyarakat	0
5	Tidak ingin bergantung ekonomi pada suami,	4
6	Tidak puas secara materi dalam perkawinan	0
7	Memanfaatkan waktu kosong	10
8	Menghindari rasa bosan di rumah	2
9	Ikut-ikutan teman/tetangga.	0

Dari seluruh responden pengusaha perempuan industri makanan, ternyata suami mereka juga bekerja dalam berbagai bidang seperti sebagai petani, pengolahan, pedagang, pegawai negeri dan

swasta. Namun demikian kontribusi pendapatan dari pengusaha perempuan industri makanan terhadap pendapatan keluarga cukup besar, berkisar antara 50% – 90 % (Tabel 3).

Tabel 3. Kontribusi Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Responden

Responden	Kontribusi Pendapatan	Tenaga Kerja
1	80 %	9
2	67 %	7
3	83 %	6
4	80 %	3
5	75 %	3
6	63 %	3
7	50 %	5
8	67 %	12
9	83 %	6
10	90 %	5
Rata-rata	74 %	5,90

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pendapatan wirausaha perempuan terhadap pendapatan total keluarga sebesar 74 %. Hal ini berarti bahwa

pendapatan wirausaha perempuan merupakan pendapatan yang utama dalam keluarga. Walaupun keterlibatan perempuan dalam usaha ini pada awalnya hanya untuk mencari

tambahan penghasilan rumah tangga, namun pada kenyataannya pendapatan yang diperoleh perempuan menandingi pendapatan suami dan anggota keluarga lain.

Dengan tumbuhnya usaha perempuan ini ternyata memberikan dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata wirausaha perempuan mampu menyediakan lapangan kerja bagi 6 orang pekerja. Kondisi ini akan memberikan multiplier effect positif

bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan terlibatnya perempuan dalam sektor ekonomi, perlu dicermati lagi apakah kondisi ini mempengaruhi fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan suatu pekerjaan (tugas) yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Berdasarkan diskusi pakar teridentifikasi 11 fungsi keluarga yang dimiliki setiap rumah tangga, yang distribusi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Keluarga oleh Responden

No	Fungsi	ayah	ibu	ayah-ibu
1.	Pendidikan	20%	40%	40%
2.	Penanaman Nilai Agama	10%	30%	60%
3.	Kasih sayang	10%	10%	80%
4.	Sosialisasi	0%	20%	80%
5.	Biologis	0%	0%	100%
6.	Perlindungan	10%	0%	90%
7.	Mencari Nafkah	40%	0%	60%
8.	Pembinaan usaha	20%	80%	0%
9.	Perencanaan anggaran keluarga	0%	80%	20%
10.	Tabungan	10%	60%	30%
11.	Aset	30%	50%	20%

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar fungsi-fungsi keluarga dilaksanakan secara bersama oleh ayah dan ibu. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan peran antara ayah dan ibu dalam melaksanakan fungsi keluarga. Sementara pada kegiatan pembinaan usaha, perencanaan anggaran keluarga, tabungan, dan pengontrolan aset didominasi oleh ibu (pengusaha perempuan). Hal ini kemungkinan berhubungan dengan keberadaan dari usaha perempuan yang diinisiasi oleh perempuan, dan besarnya kontri-

busi pendapatan perempuan dalam pendapatan keluarga.

Keterlibatan perempuan pengusaha membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dengan bekerjanya pengusaha perempuan akan berkurang waktunya untuk mengurus kegiatan rumah tangga seperti berbelanja, menyiapkan makanan/minuman, membersihkan rumah, mengasuh anak, menemani anak belajar, mengantar anak sekolah, mencuci dan menyeterika. Distribusi kegiatan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi kegiatan rumah tangga yang dilakukan responden

No	Fungsi	ayah	ibu	anak-anak	nenek kakek	pembantu
1.	Berbelanja	0%	80%	10%	0%	10%
2.	Menyiapkan makanan/ minuman, membersihkan rumah	0%	80%	10%	0%	10%
3.	Mengasuh anak	10%	70%	0%	0%	20%
4.	Menemani belajar anak	20%	60%	0%	10%	10%
5.	Mengantar sekolah	30%	60%	0%	0%	10%
6.	Mencuci dan Menyeterika.	0%	50%	20%	0%	30%

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pelaksanaan pekerjaan rumah tangga masih didominasi oleh ibu, walaupun keterlibatan ibu dalam sektor ekonomi cukup besar. Keterlibatan perempuan pengusaha dalam kegiatan berbelanja, menyiapkan makanan/minuman, membersihkan rumah, dan mengasuh anak masih tinggi, walaupun alokasi waktu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sudah semakin kecil karena sebagian besar sudah tercurah dalam

Dengan terlibatnya perempuan di sektor publik, ada beberapa efek sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya: (1) wanita akan mampu menaikkan prestise perempuan di tengah masyarakat. Karena biasanya yang sering menjadi orang sukses adalah kaum pria, karena pria secara kodrat memiliki kelebihan dibanding kaum perempuan. (2) Kurangnya interaksi dalam bermasyarakat. Di dalam pergaulan sehari-hari, wanita cenderung kurang suka berinteraksi dengan dunia sekitarnya. (3) Kurangnya penghargaan terhadap

kepala keluarga. Satu hal kejelekan dari kaum wanita lainnya adalah, jika dia telah berhasil dalam karir, si wanita cenderung merasa sombong dan tidak lagi menghargai kepala rumah tangga (suaminya). Sehingga terkadang hal ini sering menjadi penyebab retaknya sebuah mahligai rumah tangga, bahkan sering terjadi perceraian.

Dari aspek ekonomi, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja pada umumnya mempunyai dampak yang positif diantaranya: (1) Meningkatkan pendapatan keluarga (2) Terbukanya lapangan kerja bagi orang lain, lairnya. (3) Membantu kepala keluarga dalam mengurangi beban ekonomi keluarga (4) Membantu meningkatkan PDRB.

Strategi Menyiapkan Perempuan Minangkabau untuk Memasuki Dunia Bisnis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis ini berupa : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dan analisis SWOT teridentifikasi 11 strategi alternatif. Penentuan strategi prioritas dilaku-

kan dengan ANP. Penentuan strategi prioritas memperhatikan : (1). aspek teknis dan lingkungan (bahan baku, proses produksi, lingkungan), (2) aspek bisnis (pasar dan pemasaran, pendanaan, kelayakan usaha) dan (3) aspek sosial budaya Minangkabau (Adat Minangkabau, Syarak dan SDM).

Berdasarkan struktur yang terbentuk dan penilaian terhadap indikator-indikator berupa aspek dan elemen-elemen aspek serta mempertimbangkan semua hubungan dan keterkaitan yang terjadi dengan bantuan ANP didapatkan nilai-nilai masing-masing alternatif strategi. Pada Tabel 6 dapat hasil olahan data dengan bantuan ANP.

Tabel 6. Hasil agregasi alternatif strategi pengembangan

No.	Rincian Strategi	Nilai	Prioritas
1.	Manajemen rantai pasokan	0,077	7
2.	Peningkatan produksi dan produktifitas	0,068	9
3.	Pemanfaat teknologi tepat guna	0,074	8
4.	Perbaikan daya saing dengan mutu	0,079	6
5.	Peningkatan Mutu SDM dengan kursus, pelatihan, magang dan studi banding	0,101	4
6.	Menghasilkan produk sesuai permintaan pasar	0,116	2
7.	Pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk	0,113	3
8.	Peningkatan peran pemerintah dan PT	0,079	6
9.	Peningkatan manajemen usaha	0,074	8
10	Peningkatan aset dengan alternatif permodalan	0,126	1
11.	Peningkatan pemahaman nilai kekeluargaan, adat dan keagamaan	0,093	5

Berdasarkan olahan ANP memperlihatkan bahwa prioritas strategi pengembangan perempuan pengusaha Minangkabau adalah : (1) peningkatan aset dengan alternatif permodalan (nilai = 0,126), (2) menghasilkan produk sesuai permintaan pasar (nilai = 0,116), (3) pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk (nilai = 0,101), (4) peningkatan Mutu SDM dengan kursus, pelatihan, magang dan studi banding (nilai = 0,101) dan (5) peningkatan pemahaman nilai kekeluargaan, adat dan keagamaan (nilai = 0,093).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh : (1) pengusaha perempuan makanan kecil Minangkabau siap untuk memasuki dunia bisnis sebagai wirausaha, (2) pengusaha perempuan makanan kecil Minangkabau memasuki dunia bisnis secara ekonomis mampu memberikan kontribusi pendapatan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitarnya, tetapi berkurang waktunya melaksanakan fungsi-fungsi rumah tangga dan mengurus keluarganya, dan (3) untuk menyiapkan perempuan Minangkabau memasuki bisnis diperlukan strategi pengembangan

KESIMPULAN DAN SARAN

berupa : peningkatan aset, pemasaran, peningkatan mutu SDM dan peningkatan pemahaman nilai kekeluargaan, adat dan keagamaan.

Dan juga diajukan saran sebagai berikut : (1) diperlukan permodalan alternatif mudah dan murah untuk peningkatan aset usaha perempuan Minangkabau baik dari dana bergulir dari pemerintah, perbankan, koperasi dan lainnya, (2) diperlukan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap permodalan, promosi dan penyuluhan, dan (3) diperlukan penanaman kembali dan peningkatan nilai-nilai kekeluargaan dan adat bersandi syarak ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Sumbar. 2002. Sumatera Barat Dalam Angka 2002. Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Padang
- Bygrave, W. D. 1996. The Portable MBA Entrepreneurship (Bahasa Indonesia). Binarupa Aksara. Jakarta.
- David, F. R. 2002. Manajemen Strategi, Konsep. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prehallindo. Jakarta.
- Hasnah, Nofialdi dan Helmi. 1999. Peranan Pekerja Wanita Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Pedesaan. Stigma Volume VII No. 3 (ISSN 0853-3776) Unand.. Padang.
- Latif. C. N. 2002. Etnis dan Adat Minangkabau. Permasalahan dan Masa depannya. Penerbit Angkasa. Bandung
- LKAAM, Sumbar. 2002. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Pedoman Hidup Bernagari. Sako Batuah. Padang.
- Mutis, T. 1995. Kewirausahaan yang Berproses. Penerbit PT Grasindo. Jakarta.
- Pursika, L. S. 2003. Menyerauk Ketimpangan Gender: Determinasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Wanita di Bali. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Volume 1, 2003. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta.
- Saaty TL. 2001. Decision Making with Dependence and Feedback; The Analytic Network Process, The organization and prioritization of complexity. Second Edition. RWS Publications. Pittsburgh. USA.
- Sahrizal. 2003. Prospek Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Volume 2, 2003. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta.
- Sari, R. 2002. Alokasi Waktu dan Pendapatan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Kasus : Rumah tangga Kerajinan Tenun di Kenagarian Pandai
-

Sikek Kabupaten Tanah Datar Sumbar). Tesis Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wahyuni dan Hasnah. 1998. Peranan Wanita Pedesaan Dalam Kegiatan Pencarian Nafkah

Rumahtangga pada Sistem Kekerabatan Matrilineal di Sumatera Barat. Laporan Penelitian Dosen Muda BBI 1997/1998. Fakultas Pertanian, UNAND.



PEDOMAN PENULISAN JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Naskah diketik pada kertas A4 dengan huruf Georgi , ukuran 12 pts, single spasi, margin kiri dan atas masing-masing 3,5 cm, margin kanan dan bawah masing-masing 2,5 cm.

JUDUL

(Georgia, font 14, Bold, Centre)

Nama Penulis¹

(tanpa gelar akademik, Georgia, font 12,Bold,Centre)

Abstract (ditulis dalam Bahasa Inggris, Georgia, font 12, justify, single spasi, maksimum 200 kata)

Kata Kunci : 3-5 kata

Berikutnya artikel ditulis dalam bentuk 2 kolom, Georgia, font 12, justify, single spasi, dan sub bab dibold dan rata tepi kiri, dengan sistematika sbb:

PENDAHULUAN (berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup tulisan)

METODE PENELITIAN (berisi metode penelitian, metode pengambilan sampel atau responden, metode pengumpulan data, dan metode analisis data)

HASIL DAN PEMBAHASAN (dapat dibagi dalam beberapa sub-bagian)

PENUTUP (berisi kesimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan model matematika, gambar dan tabel diberi nomor sesuai urutan kemunculan. Nomor model matematika ditulis di pinggir kanan, sedangkan nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar, dan nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel.

Perujukan referensi menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun)

Penulisan daftar referensi disesuaikan dengan urutan nama abjad penulis dan disesuaikan dengan format lazimnya pada daftar pustaka.

¹ Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan dibawah judul artikel, jika penulis lebih dari 3 orang, yang dicantumkan dibawah judul artikel adalah nama penulis utama, nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.

ISSN 1979-9470



9 771979 947016